



**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN BERLANDASKAN  
KONSEP TRI HITA KARANA  
(Studi Kasus Pada Pura Khayangan Tiga Desa  
Pakraman Patoman, Kecamatan Blimbingsari,  
Kabupaten Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**I GD APRI SETYA WIJAYA**

**NIM 160810301036**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**



**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN BERLANDASKAN  
KONSEP TRI HITA KARANA  
(Studi Kasus Pada Pura Khayangan Tiga Desa  
Pakraman Patoman, Kecamatan Blimbingsari,  
Kabupaten Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu  
syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana  
Ekonomi

Oleh :

**I GD APRI SETYA WIJAYA**

**NIM 160810301036**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**

## PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha, karena berkat rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, I Ketut Subaga Yasa dan Alm. Ny Nyoman Tri Yudi Ariyani;
2. Kakekku tercinta Wayan Darna yang telah mencurahkan doa dan segenap kasih sayang;
3. Adik-adik tersayang, I Made Bagus Darma Laksana dan Nyoman Radha Suryani Dewi yang selalu memberikan semangat;
4. Seluruh guru sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi;
5. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**MOTTO**

*“Percayalah pada kemampuanmu dan banggalah akan hasil dari kerja kerasmu”*

(Meitri, 2018)

*“It will never matter how many people believe you are capable of great things, if one of those people isn’t you”*

(J. Warren Welch)

*“Mencintai Tuhan dengan tulus, menyayangi sesama manusia dan menjaga alam sekitarmu, niscaya kehidupan yang bahagia dan harmonis akan bersahabat denganmu”*

(I Gd Apri Setya Wijaya)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Gd Apri Setya Wijaya

NIM : 160810301036

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berlandaskan Konsep Tri Hita Karana (Studi Kasus Pada Pura Khayangan Tiga Desa Pakraman Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi)" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 September 2019

Yang Menyatakan



I Gd Apri Setya Wijaya

NIM 160810301036

**SKRIPSI**

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN BERLANDASKAN  
KONSEP TRI HITA KARANA**

**(Studi Kasus Pada Pura Khayangan Tiga Desa Pakraman Patoman,  
Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi)**

**Oleh:**

**I Gd Apri Setya Wijaya**

**NIM 160810301036**

**Pembimbing**

**Dosen Pembimbing Utama : Kartika, S.E., M.Sc., Ak.**

**Dosen Pembimbing Anggota : Andriana, S.E., M.Sc., Ak.**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN BERLANDASKAN  
KONSEP TRI HITA KARANA (Studi Kasus Pada Pura  
Khayangan Tiga Desa Pakraman Patoman, Kecamatan  
Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi)

Nama Mahasiswa : I Gd Apri Setya Wijaya

NIM : 160810301036

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 30 September 2019

Pembimbing I,

Kartika, S.E., M.Sc., Ak.  
NIP. 19820207 200812 2 002

Pembimbing II,

Andriana, S.E., M.Sc., Ak.  
NIP. 19820929 201012 2 002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dr. Agung Budi Sulistiyono, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 19780927 200112 1002

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN BERLANDASKAN  
KONSEP TRI HITA KARANA**

**( Studi Kasus Pada Pura Khayangan Tiga Desa Pakraman Patoman, Kecamatan  
Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : I Gd Apri Setya Wijaya

NIM : 160810301036

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

18 November 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**Susunan Panitia Penguji**

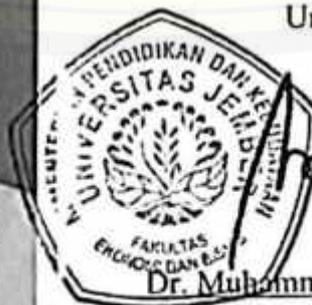
Ketua : Drs. Imam Mas'ud, M.M., Ak.  
NIP. 19591110 198902 1 001

Sekretaris : Hendrawan Santoso Putra, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 19740506 200212 1 006

Anggota : Dewi Ayu Puspita, S.E., MSA., Ak.  
NIP. 19860216 201504 2 003



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember



Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.  
NIP. 19710727 199512 1 001

I Gd Apri Setya Wijaya

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam bagaimana sistem pengelolaan keuangan di *pura khayangan tiga* dan cara mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pura Pada *Pura Khayangan Tiga* berdasarkan konsep *Tri Hita Karana* pada Desa Pakraman Patoman, sejauh mana sudah diterapkan dalam melakukan aktivitas upacara agama dan aktivitas lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara yang mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Secara umum *pura khayangan tiga* sudah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik, pengelolaan keuangan sudah sesuai yaitu dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sistem pelaporan keuangan yang dibuat oleh pengelola keuangan masih terbilang cukup sederhana ini dibuktikan pada hasil observasi dengan melihat sistem pembukuan keuangan yang disajikan hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran kas yang dijadikan satu tidak, laporan ini masih jauh dari standar sesuai PSAK 45 tentang pelaporan organisasi nirlaba. 2) Adanya pengaruh penerapan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel dengan konsep budaya lokal *tri hita karana*. Untuk akuntabilitas sudah baik akan tetapi, konsep transparansi terbilang perlu ditingkatkan lagi.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas, Transparansi, *Tri Hita Karana*.

**I Gd Apri Setya Wijaya**

*Accounting Departement, Economic and Business Faculty, Jember University*

**ABSTRACT**

*This research aims to find out and analyze in depth how the financial management system in the Khayangan Tiga temple and how to realize transparency and accountability in the management of the Temple of Khayangan Tiga Temple based on the concept of Tri Hita Karana in Pakraman Patoman Village, how far it has been applied in conducting religious ceremonial activities and other activities. This research was conducted using qualitative methods. Data collected through in-depth interviews, observation and documentation study. Data analysis techniques in this study were carried out by collecting data, data reduction, data presentation, data analysis and drawing conclusions.*

*The results showed that: 1) In general, the three heavenly temples had implemented financial management well, financial management was appropriate, starting from planning to accountability. The financial reporting system made by the financial manager is fairly simple. It is proven by the results of observations by looking at the financial accounting system that is presented only records cash income and disbursements that are combined as one, this report is far from the standard in accordance with PSAK 45 on non-profit organization reporting. 2) The influence of the application of financial management in a transparent and accountable manner with the concept of tri hita karana local culture. For accountability is good but, the concept of transparency needs to be improved.*

**Keywords:** *Financial Management, Accountability, Transparency, Tri Hita Karana.*

## RINGKASAN

**Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berlandaskan Konsep Tri Hita Karana (Studi Kasus Pada Pura Khayangan Tiga Desa Pakraman Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi);** I Gd Apri Setya Wijaya; 2019; 141 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penerapan *Good Corporate Governance* menjadi hal yang harus dilakukan oleh suatu organisasi pemerintah dan non pemerintah. Tata Kelola Perusahaan merupakan suatu konsep untuk meningkatkan kinerja manajemen dalam mengawasi atau memantau kinerja manajemen sambil menjamin akuntabilitas manajemen untuk pemegang saham berdasarkan kerangka peraturan. Tidak hanya organisasi bisnis saja yang harus memperhatikan hal terkait akuntabilitas dan transparansi akan tetapi organisasi lainnya juga sudah mulai dituntut untuk menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan akuntabel. Pentingnya pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dengan menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* di dalam setiap organisasi merupakan suatu peristiwa yang harus dicermati, hal ini dilakukan agar sebuah organisasi tersebut dapat dipercaya oleh para *stakeholder*.

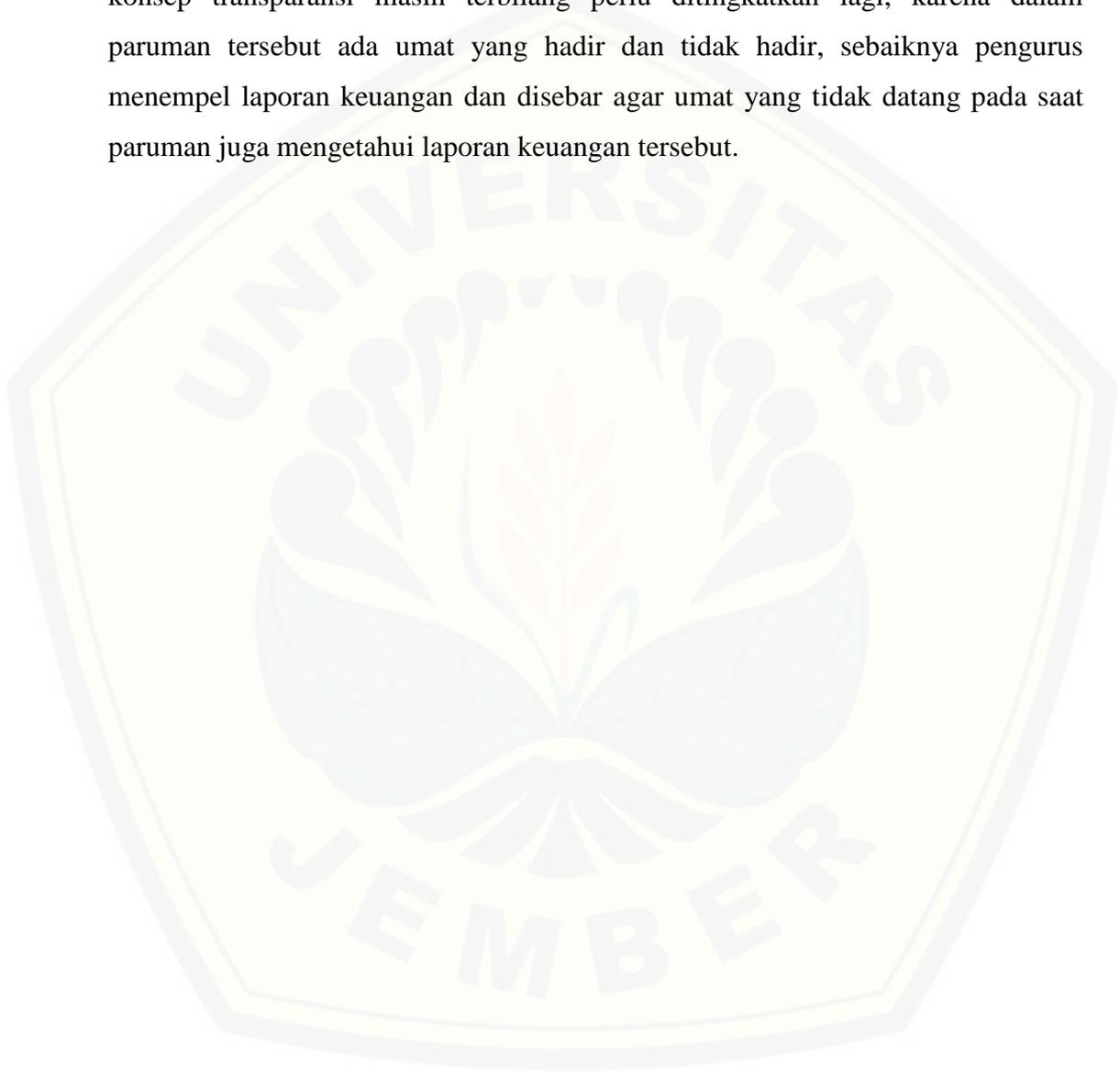
Organisasi publik non pemerintahan dan organisasi nirlaba bidang keagamaan tidak luput dari tuntutan untuk melaporkan keuangan. Pura merupakan tempat untuk menggali dan memperdalam ajaran suci yang bersumber dari veda. Dalam pelaksanaannya masyarakat hindu tidak terlepas dari nilai-nilai religius yang dipercayai, salah satunya konsep *Tri Hita Karana*. Dalam melakukan pengelolaan keuangan *Pura Kayangan Tiga* diperlukan pembukuan dan pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel secara berkesinambungan. Dalam pelaksanaan di pura, transparan artinya keuangan yang dikumpulkan harus diketahui secara terbuka oleh seluruh umat. Akuntabel berarti pengelolaan keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada umat. Tujuan melakukan pengelolaan keuangan pura secara transparan dan akuntabel untuk mendapatkan

kepercayaan dari umat *desa pakraman* dan pengalaman nyata dari ajaran *Tri Hita Karana* agar menjadi sejahtera.

Penelitian ini dilakukan di *Desa Pakraman* Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan keuangan di *pura khayangan tiga* dan bagaimana mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan berlandaskan konsep *Tri Hita Karana* pada *pura khayangan tiga*. Objek tersebut dipilih karena berbagai alasan. Pertama, *pura khayangan tiga* sudah menyusun laporan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas. Kedua, *dana punia* merupakan salah satu pemasukan dana untuk pura, cara unik inilah yang rentan terjadinya manipulasi. *Dana punia* erat kaitannya dengan perkembangan kearifan lokal sebagai landasan operasional. Ketiga, akuntansi secara umum identik dengan perusahaan besar, tetapi secara tidak langsung organisasi nirlaba seperti pura juga dilakukan penerapan akuntansi secara nyata. Alasan keempat sekaligus pertimbangan penelitian ini yaitu peneliti menemukan fenomena yang ada melalui keluhan umat, laporan keuangan masih dikerjakan secara sederhana dan tidak transparan serta tidak akuntabel. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode in-depth interview atau wawancara secara mendalam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengujian keabsahan data yang digunakan adalah metode triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji keabsahan data dengan cara membandingkan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, secara umum *pura khayangan tiga* sudah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik, pengelolaan keuangan sudah sesuai yaitu dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sistem pelaporan keuangan yang dibuat oleh pengelola keuangan masih terbilang cukup sederhana ini dibuktikan pada hasil observasi dengan melihat sistem pembukuan keuangan yang disajikan hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran kas yang dijadikan satu tidak, laporan ini masih jauh

dari standar sesuai PSAK 45 tentang pelaporan organisasi nirlaba. Kedua, adanya pengaruh penerapan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel dengan konsep budaya lokal tri hita karana. Untuk akuntabilitas sudah baik akan tetapi, konsep transparansi terbilang perlu ditingkatkan lagi. jika dilihat dari konsep transparansi masih terbilang perlu ditingkatkan lagi, karena dalam paruman tersebut ada umat yang hadir dan tidak hadir, sebaiknya pengurus menempel laporan keuangan dan disebar agar umat yang tidak datang pada saat paruman juga mengetahui laporan keuangan tersebut.



## PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha, karena berkat rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berlandaskan Konsep Tri Hita Karana (Studi Kasus Pada Pura Khayangan Tiga Desa Pakraman Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi).”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Ibu Kartika, S.E., M.Sc., Ak. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu serta dengan sabar memberikan inspirasi dan semangat kepada penulis sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Andriana, S.E., M.Sc., Ak. selaku Dosen Pembimbing Anggota serta ayah penulis di kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan semangat, motivasi, serta bimbingan selama penulis menempuh masa studi dan penyusunan skripsi hingga selesai;
6. Bapak Drs. Wasito, M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, saran, dan arahan selama masa perkuliahan dan proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah;

8. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya pada Jurusan S1 Akuntansi;
9. Kedua orang tuaku, Ibunda Alm. Ny Nyoman Tri Yudi Ariyani dan Ayahanda I Ketut Subaga Yasa yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati mencurahkan cinta, kasih sayang, semangat, dukungan, nasihat, dan doa'a kepada penulis selama ini;
10. Kakek tersayang, Wayan Darna yang tak henti- hentinya mendoakan kesuksesanku;
11. Adik-adik tersayang, I Made Bagus Darma Laksana dan Nyoman Radha Suryani Dewi yang selalu memberikan semangat;
12. Keluarga besarku yang selalu memberi motivasi, semangat, dan doa;
13. Pengurus Desa Pakraman dan Umat Desa Pakraman Patoman yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis untuk melakukan penelitian di desa tersebut;
14. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA) Periode 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga dan berkesan;
15. Widyagati Ningsih, sahabat sekaligus teman terbaik penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
16. Sahabat-sahabat penulis sejak menjadi Mahasiswa Baru, Dwima Nadya Magvira, Elma Nidya Fariyah, Diah Subagio Putri, Mochamad Nur Hidayattullah, Tegar Pratama Aris Muhtadin, Annas Miftahurrahman, Bagas Satria Adi Pratama, Davidea Rahma dan Wasilah Agustina.
17. Keluarga KKN 30 Desa Tegal Pasir Kabupaten Bondowoso yang penulis sayangi Riska Aprilia Kustanti, Salma Salsabila Putriningrum, Nadya Claudya, Sofiatu Ramlah, Rio Dwi Kurniawan, Yuslan Fajarilah, Ravikatul Munawaroh, Muhammad Fikri dan Prasadha Putra Hendharta.
18. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari seluruh pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 30 September 2019

Penulis



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Good Corporate Governance (GCG) .....	8
2.1.1 Pengertian Good Corporate Governance (GCG).....	8
2.1.2 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG).....	9
2.2 Akuntansi Dana ( <i>Fund Accounting</i> ) .....	10
2.3 Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Nomor 45.....	12
2.4 Definisi Konsep Transparansi Dan Akuntabilitas .....	13
2.4.1 Definisi Konsep Transparansi .....	13
2.4.2 Definisi Konsep Akuntabilitas .....	16
2.5 Konsep Tri Hita Karana.....	18
2.6 Laporan Keuangan.....	23
2.6.1 Pengertian Laporan Keuangan .....	23
2.6.2 Manfaat Dan Tujuan Laporan Keuangan .....	25
2.7 Desa Pakraman Atau Desa Adat.....	29
2.8 Pura Khayangan Tiga .....	30
2.9 Penelitian Yang Relevan.....	31
2.10 Kerangka Penelitian.....	38
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	39
3.2 Jenis Dan Sumber Data.....	39
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	40
3.4 Uji Keabsahan Data .....	41
3.5 Teknik Analisa Data .....	42
3.6 Tahapan Penelitian.....	43
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
4.1.1 Lokasi Pura Khayangan Tiga .....	47
4.1.2 Sejarah Pura Khayangan Tiga .....	49
4.1.3 Tata Organisasi Desa Pakraman Patoman.....	51

4.2 Sistem Pengelolaan Keuangan Pura Khayangan Tiga.....	55
4.2.1 Tahap Perencanaan.....	56
4.2.2 Tahap Penganggaran .....	58
4.2.3 Tahap Pelaksanaan .....	66
4.2.4 Tahap Penatausahaan .....	68
4.2.5 Tahap Pelaporan Keuangan.....	70
4.2.6 Tahap Pertanggungjawaban.....	76
4.3 Penerapan Konsep Tri Hita Karana Dalam Pengelolaan Keuangan Pura Khayangan Tiga Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi .....	82
4.3.1 Konsep Prahyangan.....	83
4.3.2 Konsep Pawongan .....	86
4.3.3 Konsep Palemahan .....	89
4.4 Desain Pelaporan Keuangan .....	92
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
5.1 Kesimpulan .....	96
5.2 Keterbatasan.....	98
5.3 Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>104</b>

**DAFTAR GAMBAR**

2.1 Gambar Kerangka Penelitian.....	38
3.1 Gambar Uji Keabsahan Data .....	41
3.2 Gambar Tahapan Penelitian .....	44
4.1 Gambar Struktur Organisasi Desa Pakraman Patoman.....	53
4.2 Gambar Tahap-Tahap Penyusunan RAB .....	60
4.3 Gambar Prosedur Pengelolaan Keuangan Dari Non Pemerintah .....	80
4.4 Gambar Prosedur Pengelolaan Keuangan Dari Pemerintah.....	81
4.5 Gambar Hubungan Transparansi dan Akuntabilitas dengan <i>Tri Hita Karana</i> .....	91

**DAFTAR TABEL**

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	34
4.1 Tabel Desain Laporan Aktivitas.....	94



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan .....	105
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	108
Lampiran 3 Dokumentasi Objek Penelitian .....	123
Lampiran 4 Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Tahun 2018 .....	125
Lampiran 5 Laporan Pertanggungjawaban Non Pemerintahan Tahun 2018 Dan 2019 .....	128
Lampiran 6 Dokumentasi Observasi Dan Wawancara .....	133
Lampiran 7 Tabel Rekapitulasi Penelitian .....	138

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penerapan *Good Corporate Governance* menjadi hal yang harus dilakukan oleh suatu organisasi pemerintah dan non pemerintah. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu konsep untuk meningkatkan kinerja manajemen dalam mengawasi atau memantau kinerja manajemen sambil menjamin akuntabilitas manajemen untuk pemegang saham berdasarkan kerangka peraturan (Lubis dkk., 2016; Muda dkk., 2018). Lebih lanjut, menurut (Muda dkk., 2017) bahwa konsep tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) diusulkan untuk mencapai manajemen perusahaan yang lebih transparan untuk semua pengguna laporan keuangan. Jika konsep ini digunakan dengan benar, maka pertumbuhan ekonomi diharapkan untuk bergerak maju sejalan dengan manajemen perusahaan yang lebih transparan, yang pada akhirnya memberi manfaat bagi banyak pihak. Pentingnya pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dengan menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* di dalam setiap organisasi merupakan suatu peristiwa yang harus dicermati, hal ini dilakukan agar sebuah organisasi tersebut dapat dipercaya oleh para stakeholder (Kaihatu, 2006). Tidak hanya organisasi bisnis saja yang harus memperhatikan hal terkait akuntabilitas dan transparansi akan tetapi organisasi lainnya juga sudah mulai dituntut untuk menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan akuntabel.

Organisasi publik non pemerintahan dan organisasi nirlaba bidang keagamaan tidak luput dari tuntutan untuk melaporkan keuangan (Wati dkk., 2017). Desa pakraman atau dikenal dengan desa adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup secara turun-temurun merupakan lembaga publik non pemerintahan, maka segala sesuatu yang dikelola didalam desa pakraman, terutama yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip akuntabilitas publik (Aldiasta dkk., 2017). Pura sebagai salah satu organisasi nirlaba yang menaungi bidang keagamaan yang harus melaporkan laporan keuangan yang

transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 mengenai organisasi nirlaba, yang menyatakan bahwa organisasi nirlaba diharapkan untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan (Wati dkk, 2017). Terkait dengan aturan ini pura yang ada di seluruh Indonesia khususnya daerah Banyuwangi yang penduduknya penganut agama hindu terbanyak di Jawa Timur diharapkan menerapkan aturan ini secara perlahan.

Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur yang terletak di ujung paling timur Pulau Jawa. Persebaran Agama Hindu merata di wilayah Banyuwangi. Menurut data Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama tahun 2016, Kabupaten Banyuwangi adalah kabupaten memiliki jumlah penduduk terbanyak pemeluk agama Hindu nomor satu di wilayah Jawa Timur, tercatat jumlah agama Hindu di Banyuwangi sebanyak 56.426 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 28.626 orang dan 27.800 orang perempuan. Banyaknya masyarakat di Banyuwangi akan mendorong pembangunan dan perkembangan pura di Banyuwangi, secara pura adalah tempat suci untuk memuja kebesaran *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Perkembangan pura di Banyuwangi menurut Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Banyuwangi saat ini sudah ada 123 pura yang tersebar di wilayah banyuwangi dimana pura tersebut di kelola oleh masyarakat hindu jawa yang ada di Banyuwangi. Selain masyarakat asli Banyuwangi yang bersuku jawa, Banyuwangi juga memiliki suku bali yang notabene merupakan pusat perkembangan hindu di nusantara, dimana hindu bali dibanyuwangi terletak di Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari. Kondisi pura di Kecamatan Blimbingsari sama dengan pura yang ada di bali, dimana *Desa Pakraman* Patoman ini sudah memiliki *Pura Kayangan Tiga* yang di puja oleh umat hindu setempat.

Pura merupakan tempat untuk menggali dan memperdalam ajaran suci yang bersumber dari *veda*. Ajaran suci *veda* yang nantinya mengantarkan masyarakat untuk selalu di jalan yang benar agar mencapai suatu kedamaian (Aldiasta dkk, 2017). Dalam pelaksanaannya masyarakat hindu tidak terlepas

dari nilai-nilai religius yang dipercayai, salah satunya konsep *Tri Hita Karana*. Konsep *Tri Hita Karana* tercantum dalam Kitab Suci Bhagawad Gita III. 10 dinyatakan bahwa yadnya yang menjadi dasar hubungan Tuhan Yang Maha Esa (*Prajapati*), manusia (*praja*) dan alam (*kamanduk*) (Purana, 2016). Konsep *tri hita karana* yang menjadi filosofi keseimbangan hidup masyarakat hindu di Pulau Bali, meliputi hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan (prahyangan), antar manusia (pawongan), dan antar manusia dengan lingkungan (palemahan) (Pertiwi dan Ludigdo, 2013). Menurut (Pandu dkk., 2016) Parhyangan merupakan wadah untuk menata sistem pemujaan pada Tuhan terutama di *Pura Khayangan Tiga*. *Pawongan* adalah untuk menata perilaku anggota krama dalam melakukan hubungan harmonis pada tuhan dengan pemujaan berdasarkan bhakti, hidup saling mengabdikan berdasarkan punia, dan memelihara lingkungan berdasarkan konsep “asih”. *Palemahan* adalah suatu areal sebagai wilayah desa pakraman untuk ditata agar menjadi sarana untuk melakukan ketiga kegiatan hidup, yakni kegiatan hidup berbakti kepada tuhan, hidup untuk saling “mepunia” dengan sesama, dan untuk melakukan pelestarian pada sarwa prani atau alam lingkungan.

*Pura khayangan tiga* berdasarkan fungsinya adalah sebagai tempat suci untuk memuja *Ida Sang Hyang Widhi* dan para Dewa (Pandu dkk, 2016). *Pura khayangan tiga* yang ada di desa pakraman termasuk dalam organisasi nirlaba, dimana pelaporan keuangan terhadap aktivitas keagamaan dan sosial yang dilakukan harus dilaporkan (Agustana dkk., 2017). Pentingnya pembuatan laporan keuangan di pura sebagai wujud ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat *desa pakraman* itu sendiri sehingga persepsi negatif terkait dengan pengelolaan dana keuangan pura dapat dihindari. Pengelolaan keuangan di *pura khayangan tiga* dalam mendukung *good corporate governance* terkait dengan aktivitas seperti pengelolaan keuangan dana *peturunan* (iuran wajib), pengelolaan keuangan dana punia, pengelolaan keuangan dana sesari, dan pengelolaan dana lainnya harus di laporkan. Selama ini untuk pengelolaan keuangan di *pura khayangan tiga* cenderung sederhana, karena bentuk pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan yang berupa laporan keuangan belum di dukung oleh standar-standar yang memadai (Pandu dkk, 2016). Selain itu, tidak adanya peraturan yang mengikat dalam melakukan pengolahan keuangan dapat mengakibatkan pengelolaan keuangan dengan sederhana dan bahkan tidak membuat laporan keuangan. Tidak dibuatnya laporan keuangan tentu saja menjadi suatu masalah karena laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan dengan umat untuk pengambilan keputusan.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan Pura Kayangan Tiga diperlukan pembukuan dan pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel secara berkesinambungan. Atmadja, dkk (2013) dalam buku Akuntansi Manajemen Sektor Publik, mengatakan bahwa akuntabilitas adalah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik, yang mempunyai beberapa arti yang sering disinonimkan dengan konsep dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), dapat dipertanyakan (*answerability*), dapat dipersalahkan (*blameworthiness*), dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*). Lebih lanjut, Mardiasmo (2006) mendefinisikan akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawabkan yang dilaksanakan secara periodik. Menurut Mardiasmo (2006) transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Menurut Agoes dan Ardana (2009) transparansi adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Dapat disimpulkan dalam pelaksanaan di pura, transparan artinya dana *pura khayangan tiga* yang dikumpulkan harus diketahui secara terbuka oleh seluruh umat *Desa Pakraman*. Akuntabel berarti dana pura khayangan tiga harus bisa dipertanggungjawabkan kepada umat. Tujuan melakukan pengelolaan dana Pura Khayangan Tiga secara transparan dan akuntabel dimaksudkan untuk mendapatkan kepercayaan dari umat desa

pakraman dan pengalaman nyata dari ajaran budaya lokal agama hindu yaitu konsep *Tri Hita Karana* agar menjadi sejahtera dan damai.

Hubungan antara pengelolaan yang transparan dan akuntabel dana pura khayangan tiga dengan konsep kepercayaan lokal *Tri Hita Karana* ini akan menciptakan keharmonisan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia dan lingkungan sekitar sehingga akan tercipta kesejahteraan dan kemakmuran. Jika penerapan pengelolaan dana pura ini tidak optimal maka ketidakharmonisan antara Tuhan Yang Maha Esa, sesama umat, dan lingkungan akan terjadi. Kegiatan manipulasi sama halnya dengan membohongi tuhan, umat manusia dan lingkungan sendiri, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran dari *Tri Hita Karana*.

Ada berbagai hal yang menjadi pertimbangan bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan berlandaskan konsep tri hita karena pada *Desa Pakraman Patoman*. Pertama, pura khayangan tiga sudah menyusun laporan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas, tetapi dalam penyusunannya masih sederhana walaupun hal ini sudah menunjukkan pertanggungjawaban yang baik. Apakah kesederhanaan laporan keuangan ini sudah dikategorikan realistis atau tidak. Kedua, dana punia merupakan salah satu pemasukan dana untuk pura, dimana dana punia ini menggunakan sistem pengumpulan uang yang unik, sehingga rentan terjadinya manipulasi. Dalam Agama Islam, hal ini dikenal dengan sebutan zakat. Maka dari itu, dana punia erat kaitannya dengan perkembangan kearifan lokal sebagai landasan operasional. Ketiga, akuntansi secara umum identik dengan perusahaan besar dan terkait bisnis, tetapi secara tidak langsung di level desa khususnya organisasi nirlaba seperti pura juga dilakukan penerapan akuntansi secara nyata. Contoh penerapannya terkait pencatatan pengeluaran dan pemasukan dana yang direalisasikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban.

Alasan keempat sekaligus pertimbangan penelitian ini yaitu peneliti menemukan fenomena yang ada di *Pura Khayangan Tiga Desa Pakraman*

Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi melalui keluhan umat, dimana laporan keuangan masih dikerjakan secara sederhana dan tidak transparan serta tidak akuntabel. Pernyataan ini dilihat dari penggunaan biaya untuk perawatan pura, pembuatan upakara, membeli peralatan, dan pelaksanaan upakara pura tidak disampaikan langsung maupun tertulis. Pengumuman pada saat piodalan hanya garis besar perolehan dana punia saja dan untuk saldo seluruh kas baik dari dana punia, iuran wajib dan sesari tidak langsung di sampaikan secara keseluruhan. Dengan adanya fenomena ini pengelolaan dana tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel maka akan menyebabkan ketidakpercayaan dari kineja para pengelola dana *Pura Khayangan Tiga* yang ada di *Desa Pakraman Patoman* Kecamatan Blimbingsari. Untuk mengatasi permasalahan ini maka perlu mengubah persepsi untuk meningkatkan kinerja para pengelola dana pura untuk menerapkan pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel yang tujuannya untuk mengharominskan hubungan antara tuhan, manusia dan lingkungan sesuai dengan prinsip ajaran lokal yaitu *Tri Hita Karana*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan yang terdapat pada *Pura Khayangan Tiga Desa Pakraman Patoman*, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan berlandaskan konsep *Tri Hita Karana* pada *Pura Khayangan Tiga Desa Pakraman Patoman*, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis sistem pengelolaan keuangan *Pura Khayangan Tiga Desa Pakraman Patoman*, Blimbingsari, Banyuwangi sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan pura.
2. Mengetahui dan menganalisis cara mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pura Pada *Pura Khayangan Tiga* berdasarkan konsep *Tri Hita Karana* pada *Desa Pakraman Patoman*, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi sejauh mana sudah diterapkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang terkait dengan pelaksanaan upacara agama dan aktivitas lainnya.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana *Pura Khayangan Tiga* ini memiliki beberapa manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun para pembaca penelitian ini, termasuk para pembimbing serta penguji penelitian ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan dan referensi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya ilmu akuntansi, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti dan akademisi yang berguna untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait Analisis Pengelolaan Keuangan Pura, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pura.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang ekonomi terutama dalam lingkup pengelolaan keuangan sehingga para pembaca dapat menghasilkan pemikiran yang lebih baik.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Good Corporate Governance (GCG)*

#### 2.1.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan dan masyarakat sekitar (Tunggal, 2012). Menurut Agoes (2011) *Good Corporate Governance* adalah sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepemilikan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya. Surya dan Yustiavanda (2006) berpendapat bahwa *Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders yang berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

Selanjutnya, Effendi (2009) dalam bukunya *The Power of Good Corporate Governance*, berpendapat bahwa GCG adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Sutedi (2006) mengungkapkan *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Djalil (2005), Jill Solomon dan Aris dalam buku *Corporate Governance and Accountanbillity* menyatakan *Good Corporate*

*Governance* adalah sistem yang mengatur hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham. *Corporate Governance* juga mengatur hubungan dan pertanggungjawab atau akuntabilitas perusahaan kepada anggota *stakeholders* non pemegang saham.

Dari definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah sistem pengendalian internal organisasi agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensi dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*.

### **2.1.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance***

Pada prinsipnya *good corporate governance* menyangkut kepentingan para *stakeholders*. Adapun prinsip-prinsip *good corporate governance* yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) meliputi:

1. *Transparansi (Transparency)*  
Perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *stakeholders*nya. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.
2. *Kemandirian (Indepency)*  
Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip koperasi yang sehat.
3. *Akuntabilitas (Accountability)*  
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar. Terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya

5. Kewajaran (*Fairness*)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya dan semua orang yang terlibat didalamnya berdasarkan prinsip-prinsip kesadaran dan kewajaran stakeholders.

## 2.2 Akuntansi Dana (*Fund Accounting*)

Vatter merupakan pemikir akuntansi yang pertama dalam pengembangan teori akuntansi dana yang bertujuan untuk kegiatan bisnis (Mardiasmo, 2009). Kemudian, akuntansi dana diadopsi oleh organisasi nirlaba yang mempunyai arti dana kas. Dana dalam pengertian dana kas bersifat sempit, karena pengertian dana mencakup (Sabeni dan Ghozali, 2008):

1. Kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri;
2. Terdapat kesekumpulan rekening untuk mencatat mutasi kas dan/atau sumber-sumber lainnya yang bersifat saling berimbang;
3. Mempunyai tujuan penggunaan tertentu;
4. Ada ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan dana dan penggunaannya serta pembatas-pembatasnya.

Sistem akuntansi pemerintahan yang dilakukan dengan menggunakan konsep dana, memperlakukan suatu unit kerja sebagai entitas akuntansi dan entitas anggaran yang berdiri sendiri (Mardiasmo, 2009). Penggunaan akuntansi dana merupakan salah satu perbedaan utama antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi bisnis. Sistem akuntansi dana dibuat untuk memastikan bahwa uang publik dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Dana dapat dikeluarkan

apabila terdapat otorisasi dari dewan legislatif, pihak eksekutif atau karena tuntutan peraturan perundangan. Sistem akuntansi dana adalah metoda akuntansi yang menekankan pada pelaporan pemanfaatan dana, bukan pelaporan organisasi itu sendiri.

Terdapat dua macam dana yang bisa digunakan oleh suatu organisasi nirlaba, adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2009):

1. Dana yang dapat dibelanjakan (*expandable fund*) yang digunakan untuk mencatat nilai aset, utang, perubahan aset neto, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintahan (*governmental funds*).
2. Dana yang tidak dapat dibelanjakan (*nonexpandable fund*) yang digunakan untuk mencatat pendapatan, biaya, aset, utang, dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis (*proprietary funds*).

Dalam akuntansi dana dikenal persamaan akuntansi  $\text{Aktiva} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas Dana}$ . Persamaan ini tentu saja berbeda dengan persamaan akuntansi yang kita kenal pada akuntansi keuangan yang digunakan dalam perusahaan komersial, dengan persamaan berupa  $\text{Aktiva} = \text{Kewajiban} = \text{Ekuitas}$ . Disini terdapat perbedaan yang mendasar antara ekuitas dana dan ekuitas. Di perusahaan, selisih antara aktiva dan kewajiban adalah ekuitas yang menunjukkan adanya kepemilikan pada perusahaan tersebut oleh pemegang sahamnya. Sementara, di organisasi sektor publik ekuitas dana tidak menunjukkan adanya kepemilikan siapapun karena memang tidak ada kepemilikan individu dalam suatu organisasi sektor publik.

Dalam akuntansi dana, dikenal dengan istilah basis akuntansi dan fokus pengukuran (*measurement focus*). Basis akuntansi menentukan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui. Fokus pengukuran dari suatu entitas akuntansi menentukan apa yang akan dilaporkan, dengan kata lain aktiva dan kewajiban apa

saja yang diakui secara akuntansi dan dilaporkan dalam neraca. Konsep basis akuntansi dan fokus pengukuran ini berhubungan erat dan pemilihan salah satu akan mengimplikasi pemilihan yang lain.

### 2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45

Dalam penerapannya, untuk mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) setiap organisasi publik non-pemerintahan dan organisasi nirlaba tidak luput dari tuntutan untuk melaporkan keuangan. Pelaporan keuangan organisasi nirlaba diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45 tahun 2011 mengenai organisasi nirlaba, yang menyatakan bahwa organisasi nirlaba diharapkan untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. IAI (2015) menyatakan bahwa karakteristik entitas nirlaba adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditembus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran nirlaba.

Unsur-unsur laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan  
Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto.
2. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset neto selama suatu periode.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan dapat berupa:

- a. Perincian dari suatu perkiraan yang disajikan, misalnya aktiva tetap.
- b. Kebijakan akuntansi yang dilakukan, misalnya metode penyusutan serta tarif yang digunakan untuk aktiva tetap lembaga, metode pencatatan piutang tidak dapat ditagih serta presentase yang digunakan untuk pencadangannya.

Dengan diadopsinya IAS 1 *Presentation of Financial Statements* menjadi PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan memandang perlu untuk menerbitkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang memberikan pedoman penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba yaitu ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba yang berlaku pada 2020 .

## 2.4 Definisi Konsep Transparansi Dan Akuntabilitas

### 2.4.1 Definisi Konsep Transparansi

Menurut Didjaja (2003) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Agoes dan Ardana (2009) berpendapat bahwa transparansi adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keternukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan, tidak

boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya. Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Mardiasmo (2006) menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktik KKN.

Kristianten (2006) berargumen bahwa transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif. Admadja, dkk (2013) pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia menyampaikan lima konsep, yaitu:

1. Keterbukaan (*transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Kewajaran (*fairness*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Independensi (*independency*)

Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Dengan demikian transparansi adalah informasi keuangan yang dilakukan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bawasannya masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada pengelola.

Transparansi mengacu pada ketersediaan informasi pada masyarakat dan kejelasan tentang peraturan, undang-undang dan keputusan pemerintah. Krina (2003) menyebutkan beberapa alat ukur transparansi sebagai berikut:

1. Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi : *annual reports*, brosur, *leaflet*, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, *website*, papan pengumuman, koran lokal.

2. Informasi yang disajikan : acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.
3. Penanganan keluhan: berita-berita kota di media massa dan lokal, notice of respon, limit waktu respon, opinion pools dan survei tentang isu-isu kebijakan publik, komentar dan catatan untuk draft kebijakan dan peraturan, service users survei.
4. Institusi dan organisasi daerah: baswasda, kantor PMD/BPM, kantor Humas, dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku.
5. Pertemuan masyarakat.
6. Mimbar rakyat.

#### 2.4.2 Definisi Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah salah satu prinsip yang digunakan untuk mewujudkan GCG. Ghatey (2004) berpendapat bahwa akuntabilitas ditunjukkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan yaitu apa, mengapa, siapa, kemana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan. Madiasmo (2006) mengungkapkan, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja financial kepada pihak-pihak berkepentingan. Arifiyadi (2008) mengatakan akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan *control* terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Krina (2003) berpendapat bahwa prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakholder* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Atmadja, dkk (2013) dalam buku Akuntansi Manajemen Sektor Publik,

mengatakan bahwa akuntabilitas adalah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik, yang mempunyai beberapa arti yang sering disinonimkan dengan konsep dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), dapat dipertanyakan (*answerability*), dapat dipersalahkan (*blameworthiness*), dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*). Mardiasmo (2006) mendefinisikan akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawabkan yang dilaksanakan secara periodik.

Dari definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang dilakukan setiap organisasi untuk dipertanggungjawabkan secara benar segala kinerja yang direalisasikan kepada stakeholder secara terbuka.

Plumter dalam (Martha, 2014) menyatakan bahwa untuk mencapai akuntabilitas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Exemplary leadership*, dimaksudkan bahwa seorang pemimpin harus sensitif, responsif, akuntabel, dan transparan kepada bawahan.
2. *Public debate*, artinya sebelum kebijakan yang besar disahkan seharusnya diadakan public debate terlebih dahulu untuk mencapai hasil yang maksimal.
3. *Coordination*, dimaksudkan bahwa koordinasi yang baik antara semua instansi pemerintah akan sangat baik bagi tumbuh kembangnya akuntabilitas.
4. *Autonomy*, artinya instansi dapat melaksanakan kebijakan menurut caranya sendiri yang paling menguntungkan, paling efisien dan paling efektif bagi pencapaian tujuan organisasi.
5. *Explicitness and clarity*, artinya standar evaluasi kinerja harus diungkapkan secara nyata dan jelas sehingga dapat diketahui secara jelas apa yang harus diakuntabilitaskan.

6. *Legitimacy and acceptance*, tujuan dan makna akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka pada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat ditentukan sehingga diterima oleh semua pihak.
7. *Negotiation*, maksudnya harus dilakukan negosiasi nasional mengenai perbedaan-perbedaan tujuan dan sasaran, tanggungjawab, dan kewenangan setiap instansi.
8. *Educational campaign and publicity*, dimaksudkan perlu dibuatkan pilot project pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat sehingga akan diperoleh ekspektasi mereka dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut.
9. *Feed back and evaluation*, yaitu bahwa akuntabilitas harus tentu menerus ditingkatkan dan disempurnakan, maka perlu informasi sebagai umpan baik dari penerima akuntabilitas serta dilakukan evaluasi perbaikannya.
10. *Adaption and recycling*, yaitu perubahan yang terjadi di masyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus secara terus menerus tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.

## 2.5 Konsep Tri Hita Karana

Dalam kitab suci Hindu (*veda*) sangat mudah mendapatkan petunjuk bagaimana cara melakukan bhakti kepada Tuhan. Begitu pula dalam menjalankan hubungan antar umat manusia agar terciptanya sebuah keharmonisan dan kesejahteraan alam dengan menjaga lingkungan. Ketiga hal ini sudah terdapat dalam kitab *veda* baik dalam kitab *sruti*, kitab *smrti* atau jenis kitab sastra hindu lain. Ajaran yang mengajarkan bagaimana melakukan hubungan baik melalui bhakti kepada *Ida Sang Hyang Widhi*, melakukan hubungan baik dengan sesama manusia dan bagaimana menjaga lingkungan dimana penciptaan hubungan ini akan menimbulkan kehidupan yang harmonis dan bahagia lahir dan batin belum tercantum secara khusus dalam kitab suci Hindu. Tiga hubungan yang harmonis ini disebut ajaran *Tri Hita Karana*. Wiana (2004) menyebutkan bahwa, *Tri Hita*

*Karana* menekankan pada tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia. Ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam dan hubungan dengan ketuhanan yang saling terkait satu sama lain. Tri Hita Karana diartikan sebagai tiga penyebab kesejahteraan yang bersumber pada keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), hubungan manusia dengan manusia (*pawongan*), dan hubungan manusia dengan lingkungan (*palemahan*) (Kaler:1983; Surpha: 1991; Pitana:1994; Dalem:2007; Palguna: 2007; dan Agung: 2009)

Kertih dan Sukadi (2007) dalam penelitiannya menemukan bahwa program pendidikan yang dapat memberdayakan dan ikut berpartisipasi mewujudkan nilai-nilai *Tri Hita Karana*. Keseimbangan ajaran *Tri Hita Karana* ini terjadi jika ada hubungan yang saling mengisi dan memberi satu dengan yang lain. Hubungan ini dapat diibaratkan melalui agama dan ilmu karena ada pepatah mengatakan bahwa agama tanpa ilmu lumpuh, ilmu tanpa agama buta dan kedua hubungan ini didapat melalui pendidikan. *Tri hita karana* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1. *Prahyangan* ( Hubungan Manusia dengan Tuhan)**

Untuk mencapai sesuatu yang maksimal maka harus ada usaha yang maksimal dalam mewujudkan hal tersebut, karena sesuatu yang maksimal haruslah diperoleh dari sebuah pengorbanan. Sama halnya dalam melakukan pemujaan kepada Tuhan, sebagai manusia ciptaan Tuhan harus melakukan bhakti kepada tuhan sebagai sang pencipta alam semesta. Agar berbakti pada Tuhan dapat berdaya guna bagi kehidupan ini hendaknya percaya dan bhakti pada tuhan sebagai ciri utama kehidupan beragama diarahkan pada tiga sasaran yaitu kepercayaan dan bhakti pada Tuhan ditunjukkan untuk membenahi diri sendiri (*swa artha*), ditunjukkan untuk mengabdikan pada sesama (*para artha*) dan yang tertinggi ditunjukkan untuk konsisten memelihara kepercayaan dan bhakti pada tuhan.

Tiga sikap untuk mengarahkan tiga sasaran kehidupan beragama di atas Swami Satya Narayana sebagai berikut : *swa artha*, artinya tujuan

bergama adalah diarahkan untuk meningkatkan kualitas diri. Kata *swa* dalam bahasa sansekerta artinya diri sendiri. Kata *artha* artinya tujuan. Karena itu uang atau benda yang menjadi alat untuk memperlancar tercapainya tujuan juga disebut *artha*. Jadi, *swa artha* artinya tunjukanlah ajaran agama itu pertama-tama untuk membenahi diri sendiri agar menjadi manusia yang lebih baik dan memiliki kualitas moral dan mental yang baik. Beragama hendaknya dijadikan suatu bekal atau pegangan untuk komunikasi dengan pihak luar dalam rangka mendapatkan suatu hubungan yang harmonis, saling tolong menolong dan memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi sehingga dapat menumbuhkan nilai-nilai spiritual dan sosial yang semakin kondusif untuk memajukan kehidupan bersama mencapai kebahagiaan lahir dan batin.

*Parama artha* artinya kepentingan yang paling utama. Beragama itu hendaknya ditunjukkan untuk terus menerus menanamkan keyakinan bahwa hanyalah Tuhan yang mutlak maha ada, maha suci, maha tahu, maha karya, maha kuasa dan maha esa. Karena alam dan mahluk hidup terutama manusia merupakan ciptaan Tuhan. Memelihara kesejahteraan alam dan mengabdikan pada sesama manusia haruslah diyakini sebagai suatu perbuatan atau sikap untuk mengamalkan kepercayaan dan keyakinan kita pada Tuhan. Inilah sesungguhnya wujud pengamalan *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* tidak bisa hanya diukur dengan adanya tempat pemujaan, adanya manusia dan adanya alam sebagai tempat kehidupan. Tiga hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan alam yang harus dinamis, sinergis, harmoni dan produktif untuk membawa manusia hidup semakin memperoleh kesejahteraan lahir batin yang adil dan berkesinambungan. Sistem pemujaan umat Hindu di Bali sebagai suatu implementasi konsep Hindu berdasarkan *Tri Hita Karana*. Dalam sistem pemujaan pada Tuhan dan Dewa Pitara atau roh susi leluhur di Bali tidak menukik pada pemujaan semata. sistem pemujaan yang dilakukan sebagai perwujudan sikap yang seimbang antara berbhakti pada Tuhan,

mengembangkan sistem sosial yang harmonis dan melestarikan alam lingkungan. Pemujaan pada Tuhan bagi umat Hindu juga berfungsi untuk menata sistem sosial agar sistem sosial tersebut dapat menjadi wadah untuk khidupan bersama yang harmonis, dinamis dan produktif. Produktif dalam artian dari sistem sosial tersebut diharapkan tumbuh nilai-nilai spiritual dan material secara seimbang yang dibutuhkan dalam membangun manusia yang berkualitas. Dalam konsep *prahyangan* sendiri kegiatan yang dapat dilakukan adalah melakukan upacara dewa yadnya. Dewa yadnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada Tuhan dan para dewa. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah piodalan, saraswati, pagerwesi, dll.

## 2. *Pawongan* (Hubungan Manusia dengan manusia)

*Pawongan* adalah sebuah konsep tentang bagaimana membina hubungan harmonis antara sesama manusia. Untuk mencapai terwujudnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, sebagai individu kita harus mampu mengendalikan diri kita sendiri. Karena dalam diri kita tersimpan ego dan rasa iri hati terhadap sesama. Hal tersebut tersirat di dalam Bhagawadgita V 23, sebagai berikut:

*“Dia yang mampu menahan kecenderungan keinginan dan amarah di sunia ini, sebelum meninggalkan jasad raganya. Dia adalah yogi, dia adalah orang yang bahagia”* (Puja, 2004).

Orang yang mampu menahan segala ego dan amarahnya di dunia ini, dikatakan telah mampu mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Untuk menahan segala emosi dan keinginan di dunia ini, sebagai manusia perlu untuk mengendalikan diri, pengendalian diri adalah suatu kemampuan dalam menghadapi kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang antara hak dan kewajiban sebagai individu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Apabila kita sebagai individu mampu mengendalikan diri maka tat twam

asi akan terwujud. *Tat twam asi* adalah kata dalam filsafat hindu yang mengajarkan bahwa semua adalah keluarga, mengajarkan kesosialan tanpabata karena diketahui bahwa “ia adalah kamu” saya adalah kamu dan segala mahluk adalah sama, sehingga menolong orang lain berarti menolong diri sendiri dan menyakiti oranglain adalah meyakiti diri sendiri. Oleh sebab itu, kita sebagai mahluk sosial harus saling menolong, melindungi dan menjaga antar sesama mahluk ciptaan Tuhan (Atmaja, 2010).

### 3. **Palemahan (Hubungan Manusia dengan lingkungan)**

*Palemahan* adalah konsep hubungan manusia dengan alam, bagaimana manusia memperlakukan alam dalam kehidupan masyarakat (Aldiasta dkk, 2017). Masyarakat memiliki tradisi tradisional yaitu ritual penghormatan pada segala bentuk ciptaan tuhan yang ada di alam. Terutama masyarakat Hindu di Bali memiliki cara khusus untuk mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih kepada alam melalui yadnya. Yadnya dilakukan di berbagai sumber kehidupan yang ada di alam yang diyakini bahwa dewa bersemayan di tempat tersebut. Sebagai contoh di Bali Sang Hyang Sangkara diyakini sebagai dewanya tumbuh-tumbuhan yang diwujudkan dalam bentuk upacara tumpek wariga (Wijaya, 2011). Hal ini tertuang dalam Arthavaveda VII.66.1 menyebutkan bahwa:

*“Tuhan yang maha esa ada di langit, diudara dan juga pada tanam-tanaman”* (Tittib, 1999).

Penerapan konsep palemahan salah satu kegiatan operasioanalnya seperti gotong royong banjar melaksanakan bersih-bersih lingkungan pura sebelum hari raya. Terutama dalam suatu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sendiri. Menurut Sakjoyo, dkk dalam Selvi (2012) menjelaskan bawasannya gotong royong merupakan adat istiadat tolong menolong antara warga dalam berbagai macam lapangan aktivitas sosial, baik berdasarkan hubungan tetangga kerabatan yang berdasarkan efisien yang sifatnya praktis dan ada pula aktifitas kera sama yang lain. Dalam

penulisan ini, gotong royong mengacu pada kegiatan menjaga lingkungan pura khayangan tiga sebagai tempat persembahyangan dari kerusakan bangunan maupun mencabut rumput liat yang tubuh disekitaran kawasan suci pura, dimana terdapat hubungan harmonis antara manusia dengan manusia (*pawongan*) dalam ajaran *tri hita karana*. Dalam kitan Bhagawadgita III. 30 menyebutkan bahwa:

*“Tunjukkan semua kerjamu kepada-Ku, dengan pikiranmu terpusat pada Atma bebas dari nafsu keinginan dan keaku-an, enyahkan rasa gentar dan bertempurlah (berkarma dan melakukan kewajiban)”* (Pendit, 1995).

Kegiatan gotong royong yang dilakukan pada *pura khayangan tiga* merupakan salah satu cerminan dari penerapan konsep *palemahan*. Selain gotong royong penerapan lain terkait dengan pelaksanaan *palemahan* adalah melakukan upacara pecaruan, menjaga kebersihan pura dan menjaga fasilitas yang ada di pura.

## 2.6 Laporan Keuangan

### 2.6.1 Pengertian Laporan Keuangan

Entitas non-pemerintah atau nirlaba agar dipercaya oleh *stakeholder* harus melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Pengelolaan keuangan yang baik mencerminkan bahwa pengelola keuangan pada organisasi tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel. Menurut Safir pengelolaan keuangan adalah teknik mengimbangi gaya hidup manusia seperti gaya hidup konsumtif dengan gaya hidup produktif seperti investasi, menabung ataupun bisnis. Tujuan pengelolaan keuangan ini adalah agar kita terhindar dari kondisi lebih banyak hutang daripada pemasukan. Pengelolaan keuangan ini nantinya akan dilaporkan organisasi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pengelolaan keuangan dilakukan mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Hal ini mengacu pada tahapan-tahapan dalam siklus pengelolaan keuangan desa (BPKP, 2015).

Laporan keuangan dasarnya adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dari sebuah entitas yang tujuan umumnya untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya (Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 2012) . Menurut Sundjaja dan berlian (2001) laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan. Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah sebuah proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak berkepentingan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) yang digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan.

Organisasi dalam suatu desa termasuk dalam organisasisektor publik. Hal ini berhubungan dengan sistem penyajian laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pihak berkepentingan yaitu masyarakat. Penyajian laporan keuangan pemerintahan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.01 berdasarkan PSAP No.01, laporan keuangan merupakan laporan yang tersruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan mengatur mengenai penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Tujuan umum laporan keuangan pemerintahan adalah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya bagi para penggunanya. Selain itu, tujuan umum laporan keuangan pemerintahan adalah mendemonstrasikan

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, pengguna sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan regulasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan menandai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam menandai aktivitasnya.

Menurut Bastian (2005) menyebutkan bahwa laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan predikif dan prospek, yang menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

### **2.6.2 Manfaat Dan Tujuan Laporan Keuangan**

Dibuatnya laporan keuangan oleh suatu organisasi desa seperti Dana Pura Khayangan Tiga memiliki berbagai tujuan. Ada beberapa tujuan laporan keuangan menurut para ahli diantaranya: menurut Kusnadi (2000) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah:

1. Untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi.

2. Menunjukkan apa yang telah dicapai oleh pihak manajemen perusahaan dimasa lampau sehingga para pihak yang berkepentingan atas perusahaan mempunyai dasar berpijak dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan,

Menurut Fahmi (2012) tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka dalam satuan moneter. Selanjutnya menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.01 paragraf 07 revisi 2009 menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Andriani (2014), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Terdapat 10 karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu:

1. Dapat dipahami  
Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudaannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Hal ini berasumsi bahwa pengguna memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.
2. Relevan  
Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara

membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka masa lalu.

3. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan *omission* atau kesalahan dalam mencatat *misstatement*.

4. Keandalan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal, artinya informasi memiliki kualitas bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian yang dilakukan secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

5. Substansi mengungguli bentuk

Transaksi, peristiwa, dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

6. Pertimbangan sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat meakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan aset atau penghasilan lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban lebih tinggi. Jadi pertimbangan sehat ini sama dengan tidak mengijinkan bias.

7. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda.

8. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesenjangan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan. Oleh karena itu, tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

9. Tepat waktu

Agar relevan, informasi laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi penggunanya. Tepat waktu yang meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak seharusnya maka informasi akan kehilangan relevansinya. Manajemen diharuskan menyeimbangkan antara pelaporan yang tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Pertimbangan utama yang harus diperhatikan untuk menyeimbangkan relevansi dan keandalan adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna untuk mengambil keputusan ekonomi.

10. Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Namun, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

## 2.7 Desa Pakraman atau Desa Adat

Desa adat atau dikenal dengan *desa pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kyangan Tiga* atau *Khayangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2/2001 Tentang *Desa Pakraman*). Pasal 1 nomor urut 1 UU Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa menyebutkan Desa adalah desa, dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mewakili batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa desa pakraman adalah suatu organisasi masyarakat hindu bali yang berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan spiritual keagamaan yang mendasar yang diperuntukkan membangun suatu hubungan dan interaksi sosial masyarakat bali. Menurut Pitana (1993), sebuah desa pakraman memiliki tiga unsur, antara lain:

1. Unsur *parahyangan*, berupa pura atau tempat suci agama hindu
2. Unsur *pawongan*, warga desa yang beragama hindu
3. Unsur *palemahan*, wilayah desa yang berupa karang ayahan desa dan karang guna kaya

Desa adat memiliki ciri dasar yang sama, tetapi tetap memiliki karakteristik sendiri karena keotonomannya. Dengan adanya konsep desa kala patra, yang masing-masing memiliki arti tempat berada, waktu, dan aturan yang berlaku (Sumba, 2002). Berdasarkan hal ini maka Majelis Pembinaan Lembaga Adat (1991) dalam Pitana (1994), membagi desa menjadi sebagai berikut:

1. Desa Bali Aga (Bali Mula), yaitu desa adat yang masih tetap menganut tradisi pra majapahit. Pada desa-desa seperti ini, tidak dikenal sistem

kasta, pendeta tertinggi tidak melakukan upacara padiksan, dan kepemimpinan desa umumnya menganut pola kembar ataupun kolektif. Desa seperti ini biasa terdapat didaerah pegunungan di Bali.

2. Desa Apanaga yaitu desa yang sistem kemasyarakatannya sangat dipengaruhi oleh majapahit. Desa ini umumnya menganut kepemimpinan tunggal. Desa dengan sistem ini biasa ditemui di daerah dataran.
3. Desa Anyar yaitu desa yang terbentuk relatif baru, sehingga akibat dari adanya perpindahan penduduk. Desa ini umumnya ditemui di Bali di daerah Jembrana dan Buleleng Barat.

Dalam penataan desa dan khayangan, Mpu Kunturan mengamalkan Tri Murti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa yang manifestasinya dalam wujud khayangan tiga yaitu Pura Puseh, Pura Desa, dan Pura Dalem. Setiap desa mempunyai Khayangan Tiga yang merupakan tempat pemujaan bagi seluruh krama (warga) desa. Bahkan segala kegiatan warga desa berpusat pada kewajiban berkaitan KhayanganTiga.

## **2.8 Pura Khayangan Tiga**

Secara etimologi kata Khayangan Tiga terdiri dari dua kata yaitu Khayangan dan tiga. Khayangan berasal dari kata hyang yang berarti suci mendapat awalan ka dan akhiran an, an menunjukkan tempat dan tiga artinya tiga (Ardana, 1999). Jadi dapat disimpulkan bahwa khayangan tiga adalah tiga buah tempat suci, yaitu pura puseh, pura desa dan pura dalem. Pura puseh dibangun pada bagian arah selatan dari desa yang mengarah kepantai karena itu pura puseh sering disebut pura segara, pura desa biasanya dibangun di tengah-tengah pada salah satu sudut dari caturpata atau perempatan agung. Pada sudut yang lain terdapat bale wantilan (balai desa) rumah pejabat desa, pura dalem dibangun mengarah ke barat daya dari desa karena arah barat daya adalah arah mata angin yang dikuasai oleh Dewa Rudra yaitu aspek Siwa yang berfungsi mempralina segala yang hidup.

Sumantra (2009) menyebutkan bahwa khayangan atau prahyangan berasal dari kata Hyang (biasanya dihubungkan dengan sang, dang) merupakan kata

sandang yang ditempatkan didepan sesuatu yang dimuliakan atau dihormati. Menurut Tim Penyusun Buku Agama Hindu Tingkat SMA khayangan adalah tempat pemujaan Tuhan Yang Maha Esa oleh umat hindu di indonesia dan kata tiga mempunyai arti nama bilangan bagi lambang bilangan asli tiga, jadi Pura Khayangan Tiga dalam penjelasan tersebut adalah tiga tempat suci umat hindu yang digunakan sebagai tempat memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa dalam manifestasinya sebagai Tri Murti.

## 2.9 Penelitian yang Relevan

Gede Ari Pandu (2015) dengan skripsinya yang berjudul *Transparansi Dan Akutabilitas Pengelolaan Dana Dadia Yang Dilandasi Konsep Budaya Lokal Tri Hita Karana (Studi Kasus Pada Dadia Pasek Tangkas Kori Agung Di Desa Pakraman Tegalengga )* isi yang dikemukakan tentang : a) sistem pelaporan keuangan dadia; b) eksistensi konsep tri hita karana dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana dadia. Hasil dari penelitian ini adalah: a) terdapat tiga jenis pemasukan dadia yang berasal dari peturunan, dana punia dan bansos; b) alasan dadia pasek tangkas kori agung membuat laporan keuangan secara sederhana dikarenakan transaksi yang tidak rutin terjadi, lingkup organisasi yang kecil dan tingkat pendidikan anggota yang masih rendah; c) pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan dadia secara transparan sangat berpengaruh terhadap kosep budaya lokal tri hita karana.

Gede Widia Agustana (2017) dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Sumber Dana Transparansi Dan Akutabilitas Pengelolaan Keuangan Pura Kayangan Tiga Di Desa Pakraman Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng*. Isi yang dikemukakan adalah sumber keuangan pada pura khayangan tiga dan proses pengelolaan dan pertanggungjawaban sumber dana pura khayangan tiga yang berkaitan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Hasil dari penelitian ini adalah: a) secara garis besar sumber atau pendapatan pura khayangan tiga berasal dari dana punia, sesari, SHU LPD dan bantuan dari pemerintah; b) dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus dimana setiap ada

pembangunan terlebih dahulu dibuatnya RAB yang menjadi acuan; c) dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik harus ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang terdiri dari rincian pengeluaran pada saat pembangunan dan upacara, laporan akan dibahas pada waktu sabhadesa dan jika ada masalah diselesaikan dengan musyawarah; d) dalam menunjang konsep akuntabilitas dan transparansi pura khayangan tiga, pengurus mengumumkan pemasukan dan pengeluaran pada saat rapat atau sangkepan dengan diumumkan kembali pada saat piodalan.

Ni Luh Yadnya Wati (2017) dengan skripsinya yang berjudul *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Air Desa Sebagai Pendapat Tambahan Pada Pura Desa Banyuning*. Isi yang dikemukakan adalah kebijakan penerapan tarif pada sumber air desa dan sistem pelaporan dana air sebagai pendapatan tambahan. Hasil penelitiannya adalah; a) yang melatarbelakangi mengaambil kebijakan tarif karena kurangnya dana yang dimiliki pura untuk membayar rekening air dan perbaikan tempat pencarian air; b) sistem pelaporan keuangan yang dibuat oleh pura desa banyuning khususnya untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari tempat pencairan air tersebut masih terbilang sederhana, hal ini dibuktikan dari observas bahwa sistem pembukuan keuangan yang disajikan hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran yang dicatat menjadi satu tidak memakai kolom dan tidak membuat laporan keuangan sesuai standar pelaporan keuangan yang ada di Indonesia.

Luh Putu Dewi Sulistiani (2017) dalam skripsinya yang berjudul *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Punia Didadia Prebali, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng*. Isi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah proses pengeloaan dana punia dan penerapan prinsip akuntabilita dan transparansi. Hasil penelitiannya adalah Penerapan prinsip transparransi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana punia di dadia prebali sudah diterapkan dengan baik hal ini dapat dilihat dari keterbukaan yang dilakukan oleh pengurus dadia prebali dalam proses pengelolaan dana punia dan penggunaan dana punia di dadia prebali, serta keikutsertaan seluruh krama dadia baik yang menyandang

disabilitas atau yang tinggal diluar bali dalam seluruh kegiatan dan hal ini dapat meningkatkan kepercayaan krama dadia terhadap pengurus dadia.

I Made Aldiasta (2017) dalam skripsiya yang berjudul Mengungkap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pelaba Pura Khayangan Tiga (Studi Kasus Pura Khayangan Tiga Desa Pakraman Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar). Isi yang dikemukakan adalah proses pengelolaan keuangan pelaba dan pemahaman pengelola keuangan terkait prinsip-prinsip akuntabilitas. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Prajuru desa pakraman bitera memahami bahwa akuntabilitas berperan penting sebagai wujud pertanggungjawaban yang dibuktikan dengan dipenuhinya prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1. Prajuru desa pakraman melakukan transparansi dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan memberikan kemudahan akses informasi kepada stakeholder terkait.
2. Konsep liabilitas oleh *prajuru desa pakraman bitera* dipahami sebagai sanksi moral yang akan diterima dalam kehidupan sosial.
3. Wujud kontrol yang dilakukan oleh prajuru desa pakraman bitera dengan melibatkan semua stakeholder terkait.
4. Responsibilitas sebagai sebuah tanggung jawab oleh prajuru desa pakraman bitera dengan membuat laporan pertanggungjawaban.
5. Responsivitas diwujudkan dengan menerima masukan dari warga yang disampaikan melalui pasamuhan banjar.

Perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang terdahulu adalah terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian yang diambil adalah pura khayangan tiga yang terletak di *Desa Pakraman Patoman*, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi. Selain objek yang berbeda, latar belakang penelitian yang dilakukan juga berbeda.

Berikut adalah penelitian yang terdahulu yang mendasari penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul	Penulis	Hasil Penelitian
<p>Transparansi Dan Akutabilitas Pengelolaan Dana Dadia Yang Dilandasi Konsep Budaya Lokal <i>Tri Hita Karana</i> (Studi Kasus Pada Dadia Pasek Tangkas Kori Agung Di Desa Pakraman Tegalengga )</p>	<p>Gede Ari Pandu (2015)</p>	<p>Terdapat tiga jenis pemasukan dadia yang berasal dari peturunan, dana punia dan bansos; alasan dadia pasek tangkas kori agung membuat laporan keuangan secara sederhana dikarenakan transaksi yang tidak rutin terjadi, lingkup organisasi yang kecil dan tingkat pendidikan anggota yang masih rendah; pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan dadia secara transparan sangat berpengaruh terhadap kosep budaya lokal <i>tri hita karana</i>.</p>
<p>Analisis Sumber Dana Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan <i>Pura Kayangan Tiga Di Desa Pakraman Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng</i></p>	<p>Gede Widia Agustana (2017)</p>	<p>Secara garis besar sumber atau pendapatan pura khayangan tiga berasal dari dana punia, sesari, SHU LPD dan bantuan dari pemerintah; dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus dimana setiap ada pembangunan terlebih dahulu dibuatnya RAB yang menjadi acuan; dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik harus ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang terdiri</p>

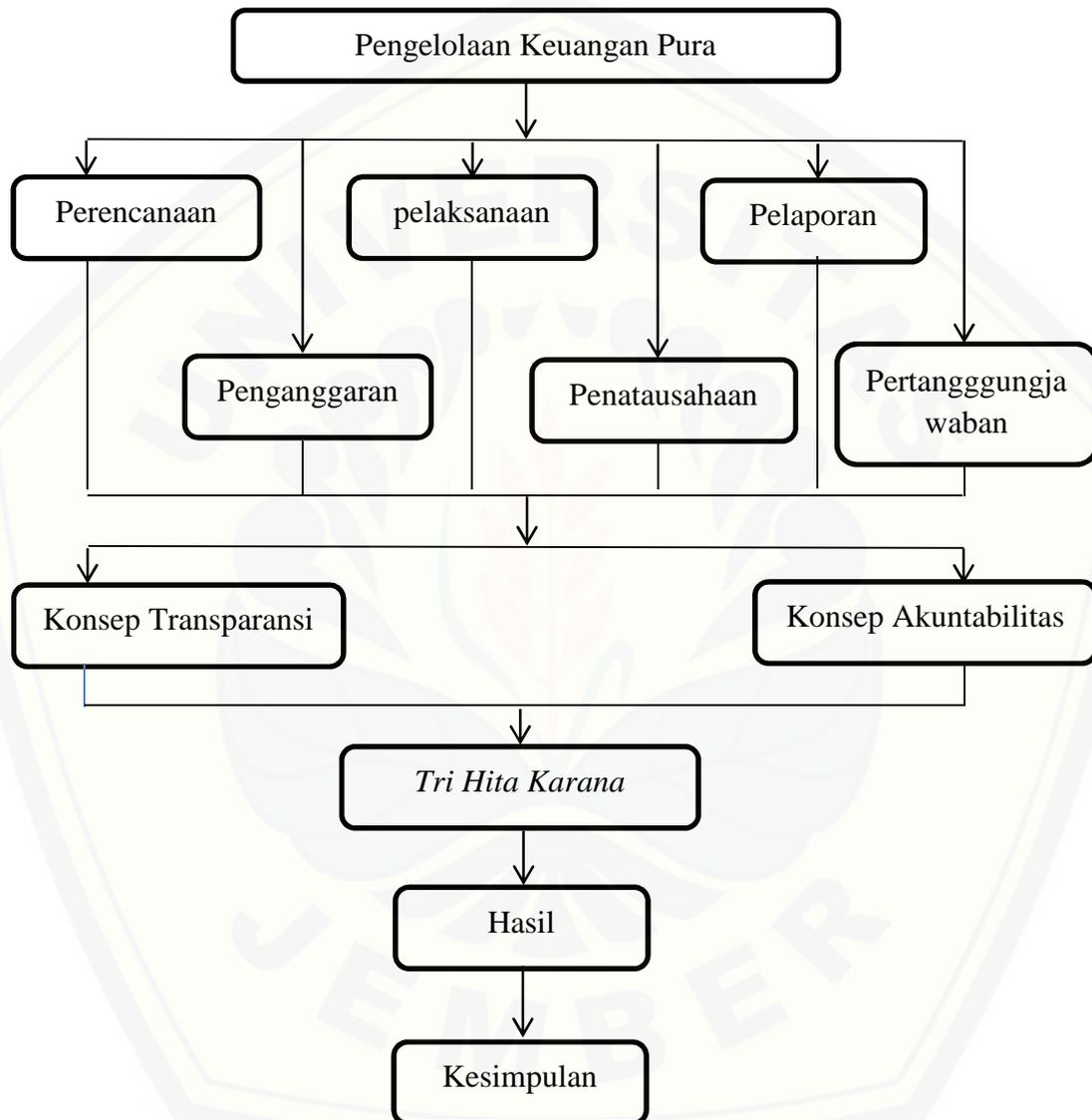
		<p>dari rincian pengeluaran pada saat pembangunan dan upacara, laporan akan dibahas pada waktu sabhadesa dan jika ada masalah diselesaikan dengan musyawarah; dalam menunjang konsep akuntabilitas dan transparansi pura khayangan tiga, pengurus mengumumkan pemasukan dan pengeluaran pada saat rapat atau sangkepan dengan diumumkan kembali pada saat piodalan.</p>
<p>Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Air Desa Sebagai Pendapat Tambahan Pada Pura Desa Banyuning.</p>	<p>Ni Luh Yadnya Wati (2017)</p>	<p>Yang melatarbelakangi mengaambil kebijakan tarif karena kurangnya dana yang dimiliki pura untuk membayar rekening air dan perbaikan tempat pencarian air; sistem pelaporan keuangan yang dibuat oleh pura desa banyuning khususnya untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari tempat pencairan air tersebut masih terbilang sederhana, hal ini dibuktikan dari observas bahwa sistem pembukuan keuangan yang disajikan hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran yang dicatat menjadi satu tidak memakai kolom dan tidak membuat laporan keuangan sesuai</p>

		standar pelaporan keuangan yang ada di Indonesia.
<p>Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana <i>Punia</i> Didadia Prebali, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.</p>	<p>Luh Putu Dewi Sulistiani (2017)</p>	<p>Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana <i>punia</i> di <i>dadia</i> prebali sudah diterapkan dengan baik hal ini dapat dilihat dari keterbukaan yang dilakukan oleh pengurus <i>dadia</i> prebali dalam proses pengelolaan <i>dana punia</i> dan penggunaan <i>dana punia</i> di <i>dadia</i> prebali, serta keikutsertaan seluruh krama <i>dadia</i> baik yang menyandang disabilitas atau yang tinggal diluar bali dalam seluruh kegiatan dan hal ini dapat meningkatkan kepercayaan krama <i>dadia</i> terhadap pengurus <i>dadia</i>.</p>
<p>Mengungkap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan <i>Pelaba Pura Khayangan Tiga</i> (Studi Kasus <i>Pura Khayangan Tiga</i> Desa Pakraman Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar)</p>	<p>I Made Aldiasta (2017)</p>	<p>Prajuru desa pakraman bitera memahami bahwa akuntabilitas berperan penting sebagai wujud pertanggungjawaban yang dibuktikan dengan dipenuhinya prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prajuru <i>desa pakraman</i> melakukan transparansi dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan memberikan kemudahan akses</li> </ol>

		<p>informasi kepada <i>stakeholder</i> terkait.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Konsep liabilitas oleh prajuru <i>desa pakraman</i> bitera dipahami sebagai sanksi moral yang akan diterima dalam kehidupan sosial.</li><li>3. Wujud kontrol yang dilakukan oleh prajuru <i>desa pakraman</i> bitera dengan melibatkan semua stakeholder terkait.</li><li>4. Responsibilitas sebagai sebuah tanggung jawab oleh prajuru <i>desa pakraman</i> bitera dengan membuat laporan pertanggungjawaban.</li><li>5. Responsivitas diwujudkan dengan menerima masukan dari warga yang disampaikan melalui <i>pasamuhan banjar</i>.</li></ol>
--	--	--

## 2.10 Kerangka Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kerangka konseptual:



**Gambar 2.1** Kerangka Penelitian

## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan deskriptif (penelitian deskriptif kualitatif). Penelitian dengan metode ini dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami uatu subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara bolistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaat berbagai metode ilmiah (Moleong, 2012)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang diteliti. Penelitian semacam ini digunakan untuk mengambil kebijakan atau keputusan untuk melakukan atau memberikan solusi pemecahan suatu masalah (Susanti, 2014). Penelitian ini mengangkat mengenai fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang saat ini terjadi dan disajikan dengan apa adanya.

Penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai transparasi dan akuntanbilitas dana *Pura Khayangan Tiga*.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber aslinya, dengan cara wawancara atau interview dengan pengelola perusahaan atau dengan pihak lain yang memiliki wewenang untukmemberikan keterangan atas permasalahan yang disajikan pada saat penelitian (Indriantoro dan Supomo dalam Mulyadi, 2013). Sumber data utama dapat dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio, pengambilan foto, atau film. Moleong (2014) menyebutkan pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.

Data primer terkait dengan penelitian ini diperoleh oleh peneliti dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yaitu pemangku, kelian adat dan bendahara Pura Khayangan Tiga Desa Pakraman Patoman, Blimbingsari, Banyuwangi.

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi keputusan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian (Sunyoto, 2013). Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan catatan-catatan akuntansi dari setiap biaya yang dikeluarkan oleh bendahara didalam melakukan upacara keagamaan, pemasukan biaya dan laporan mengenai program sosial yang dijalankan. Selain itu sumber lain berupa literatur, e-jurnal, dan internet surfing juga digunakan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan objek dan ruang lingkup penelitian

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

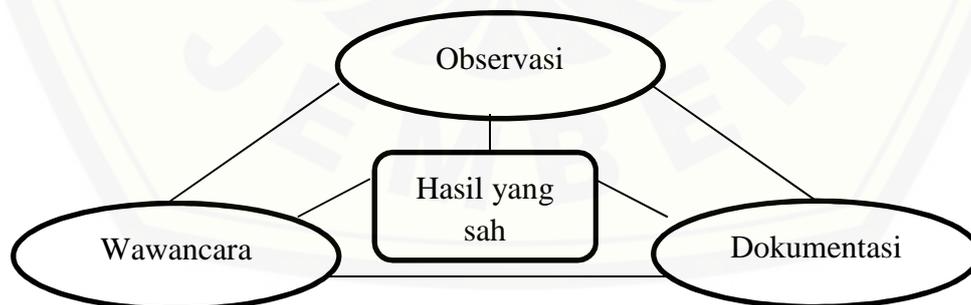
1. Wawancara mendalam, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pengelola keuangan pura, seperti pemangku yang mengetahui seluk beluk upacara agama yang dilakukan di *Pura Khayangan Tiga, kelian adat* yang mengetahui program-program yang dijalankan *desa pakraman*, bendahara pura yang mengetahui seluk beluk kas keluar dan kas masuk serta umat untuk mengetahui hasil dan kebenaran yang pasti, dan umat yang menyalurkan dana dan membantu seluruh kegiatan pura .
2. Observasi, observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan secara lansung dengan cermat yang dilakukan di lokasi penelitian secara langsung. Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang jelas dan konkrit secara langsung, dari hasil observasi ini nantinya akan diperolehnya gambaran secara jelas mengenai masalah yang ada dan menemukan cara untuk memecahkan masalah

tersebut. Di dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian secara langsung mengenai proses penggunaan sistem laporan keuangan Pura Khayangan Tiga Desa Pakraman Patoman, Blimbingsari, Banyuwangi terkait fenomena transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pura.

3. Studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan catatan akuntansi terkait dengan pengeluaran dan pemasukan yang terjadi di Pura Khayangan Tiga Desa Pakraman Patoman, Blimbingsari, Banyuwangi. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis (Bungin, 2001).

### 3.4 Uji Keabsahan Data

Moleong (2004) mendefinisikan, uji keabsahan data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Pada penelitian ini digunakan dengan metode Triangulasi metode, dalam hal ini digunakan dengan cara membandingkan informasi. Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi peneliti menggunakan hasil dari wawancara dan observasi yang nantinya akan di bandingkan dengan data dokumentasi yang ada.



**Gambar 3.1** Uji Keabsahan Data

### 3.5 Teknik Analisis Data

Moleong (2014) mendefinisikan teknik analisis data adalah proses pengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Miles dan Huberman (1992) menyebutkan ada empat langkah yang dilakukan dalam teknik data kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi serta penarikan kesimpulan. Implementasi empat tahapan teknik analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu tahapan dimana peneliti melakukan penghimpunan data-data mentah dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang ada. Dalam penelitian ini, pengumpulan data diperoleh melalui kegiatan wawancara dan observasi secara langsung yang nantinya akan peneliti catat secara objektif dan akan dilengkapi dengan dokumen sebagai sumber data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang diperoleh dari pemangku, kelian adat dan bendahara *Pura Khayangan Tiga Desa Pakraman Patoman*.

2. Reduksi Data

Reduksi data meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempertajam analisis (Miles dan Hamberman, 1992). Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menghilangkan jawaban-jawaban informasi yang keluar dari konteks mengenai transparansi dan akuntabilitas dana pura. Selanjutnya akan diberi kode agar data yang diperoleh akan runtut. Maka dari itu, proses reduksi berkaitan dengan pemilahan data yang dilihat dari relevansinya pertanyaan penelitian.

3. Penyajian Data

Pada tahap ini data data terkait transparansi dan akuntabilitas dana pura yang telah dikumpulkan dan diurutkan yang selanjutnya akan disajikan secara deskripsi.

#### 4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, hasil penelitian yang sudah terkumpul dan dirangkum harus dicocokkan pada reduksi dan penyajian data agar kesimpulan yang dihasilkan dapat disepakati dan di susun sebagai sebuah laporan. Selain itu juga kegiatan pengumpulan data, reduksi dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian terait dan bisa berlangsung secara ulang-alik, sampai mendapatkan hasil penelitian akhir yang bersifat holistic dan sarat makna dalam konteks pemberian jawaban erhadap masalah yang dikaji (Atmadja, 2006).

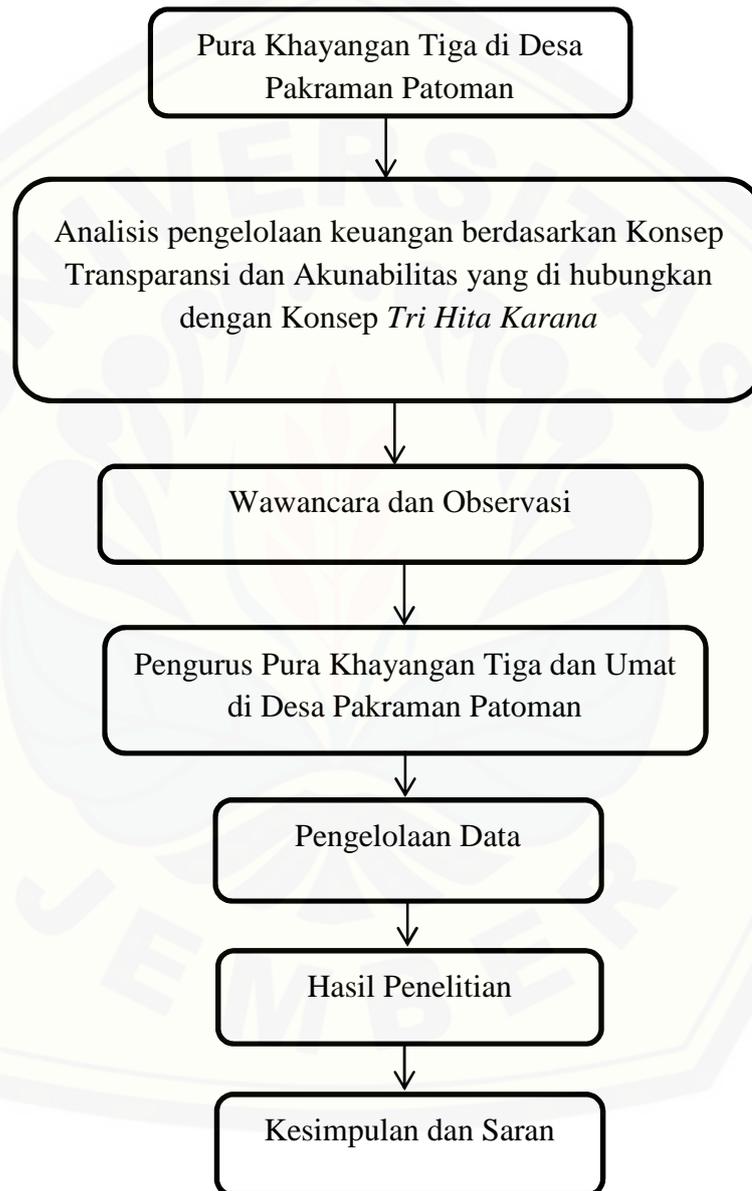
### 3.6 Tahapan penelitian

Moleong (2017) berpendapat bahwa, tahapan penelitian merupakan gambaran tentang keseluruhan perencanaan, pelaksanaan analisis dan penafsiran data, sampai penulisan laporan. Tahapan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dengan mempelajari, menelaah, dan mereview buku dan literatur untuk mengetahui apa saja termasuk komponen transparansi dan akuntabilitas dana pura.
2. Mempelajari dan memahami konsep mengenai sistem akuntansi yang transparansi dan akuntabilitas secara keseluruhan dan dihubungkan dengan penerapan konsep *Tri Hita Karana*.
3. Menganalisis bukti-bukti atau data-data terkait dengan proses akuntansi yang transparansi dan akuntabilitas serta analisis data terkait dengan aktivitas pelaksanaan yang berhubungan dengan penerapan *Tri Hita Karana*.
4. Membuat deskripsi dari hasil data-data yang sudah di hasilkan dari proses wawancara dan observasi baik untuk sistem pelaporan keuangan dan konsep *Tri Hita Karana* dalam melaporkan laporan keuangan yang transparansi dan akuntabel.

5. Membandingkan deskripsi yang dihasilkan dengan data dokumentasi yang ada.
6. Penarikan kesimpulan dan saran.

Adapun bagan alur penelitiannya adalah sebagai berikut



**Gambar 3.2** Tahapan Penelitian

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Pada bab sebelumnya sudah dipaparkan secara mendetail berbagai pokok permasalahan ataupun fenomena dari penelitian ini dan dikaitkan dengan jawaban-jawaban narasumber terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, terkait penerapan unsur-unsur transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan *pura khayangan tiga* berlandaskan konsep *tri hita karana*. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum *pura khayangan tiga* sudah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik, dimana pengelolaan keuangan yang dilaksanakan sudah sesuai yaitu dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, pengurus membuat SOP untuk pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan, selanjutnya pada tahap penganggaran pengurus menyusun RAB terkait uraian maksimal dana yang dibutuhkan untuk seluruh aktivitas operasional yang akan selanjutnya, kemudian tahap pelaksanaan, pada tahap ini pengurus beserta umat melaksanakan seluruh kegiatan. Setelah tahap pelaksanaan, selanjutnya adalah tahap penatausahaan dimana pada tahap ini panitia khususnya bendahara panitia membuat laporan memasukan dan pengeluaran keuangan yang disertai bukti seperti kuitansi dan nota. Setelah melaksanakan penatausahaan, selanjutnya pengurus membuat pelaporan terkait aktivitas operasional yang dilakukan. Setelah pelaporan adalah pertanggungjawaban, dimana pada tahap ini pengurus mempertanggungjawabkan laporan keuangan ke seluruh umat yang dilakukan pada saat *paruman*. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa sistem pelaporan keuangan yang dibuat oleh pengelola keuangan masih terbilang cukup sederhana ini dibuktikan pada hasil observasi dan dokumentasi dengan melihat sistem pembukuan keuangan yang disajikan hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran kas yang dijadikan satu tidak membuat laporan lengkap (laporan posisi keuangan,

laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan) ini masih jauh dari standar pelaporan keuangan sesuai PSAK 45 tentang pelaporan organisasi nirlaba. Untuk laporan keuangan juga dikerjakan manual. Pelaporan keuangan yang dibuat secara sederhana karena didasari oleh kepercayaan seluruh krama didalam mengelola keuangan yang didapat melalui peturunan, dana punia, bantuan sosial, denda dan bantuan pemerintah untuk memenuhi kegiatan operasional pura. Terdapat beberapa alasan kenapa sistem pelaporan keuangan pura masih dibuat secara sederhana adalah sebagai berikut:

- a Transaksi yang tidak rutin terjadi, maksudnya disini transaksi yang dilakukan oleh pengurus terkait kegiatan operasional *pura khayangan tiga* sangat sedikit dan hanya terjadi pada saat menjelang upacara keagamaan berlangsung sehingga tidak perlu dibuatkan laporan keuangan yang mendetail
  - b Lingkup organisasi yang kecil, maksudnya karena pura merupakan organisasi kecil jadi pengurus merasa tidak perlu membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang ada di Indonesia
  - c Tingkat pendidikan umat yang masih rendah, jadi disini maksudnya kebanyakan dari umat sendiri di dalam jenjang pendidikan rata-rata klasifikasi pendidikannya hanya lulusan SMP sehingga jika dibuatkan laporan keuangan yang mendetail sesuai dengan standar akuntansi yang diterapkan di Indonesia menyebabkan *krama* semakin tidak mengerti dengan laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus di dalam pemasukan dan pengeluaran kas. Sehingga hal ini menyebabkan pengurus hanya membuat sistem pelaporan keuangan secara sederhana agar krama bisa memahami dan mengerti dari apa yang ada di dalam laporan keuangan
2. Adanya pengaruh penerapan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel dengan konsep budaya lokal *tri hita karana*. Jika di dalam

pengelolaan keuangan pura di realisasikan secara transparan dan akuntabel pada seluruh *umat* di dalam memaparkan pemasukan dan pengeluaran pura dalam menjalankan aktivitas operasinya maka penerapan konsep *tri hita karana* itu sudah dikatakan terwujud secara optimal begitu juga sebaliknya. Secara tidak langsung disini pengurus sudah mengharmoniskan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungan. Disini sangat besar peran *kelian adat* dalam mengatur dan menerapkan strategi ini agar mampu mengoptimalkan ajaran agama hindu yang diimplementasikan pada pertanggungjawaban keuangan. Apabila pengurus melakukan manipulasi di dalam melakukan aktivitas operasional di *pura khayangan tiga* dimana antara pemasukan dan pengeluaran tidak sama dengan kenyataannya secara langsung menentang ajaran agama yaitu *tri hita karana*. Contohnya seperti mencuri atau korupsi dalam hal ini dana digunakan untuk kegiatan persembahyangan kepada Tuhan berarti sudah menentang konsep *prahyangan*, selanjutnya didalam melakukan *paruman* atau rapat bendahara mengumukan jumlah pemasukan dan pengeluaran secara tidak benar yang tidak sesuai dengan kenyataan maka hal ini menentang konsep *pawongan*. Selain itu, jika dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan tapi pengurus menggunakan untuk kepentingan individu maka kegiatan ini menentang konsep *palemahan*. Untuk pertanggungjawaban yang ada di *pura khayangan tiga* ini sudah terbilang bagus hal ini termasuk dalam penerapan akuntabilitas akan tetapi, jika dilihat dari konsep transparansi masih terbilang perlu ditingkatkan lagi, karena dalam *paruman* tersebut ada umat yang hadir dan tidak hadir, sebaiknya pengurus menempel laporan keuangan dan disebar agar umat yang tidak datang pada saat *paruman* juga mengetahui laporan keuangan tersebut.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka hanya berlaku pada objek yang di teliti. Selain itu, penelitian ini sebagian

besar menggunakan data primer melalui metode wawancara yang mendalam. Oleh sebab itu, kecenderungan terjadi bias masih tetap ada karena penelitian ini masih sangat bergantung terhadap interpretasi peneliti atas makna-makna yang tersirat dalam proses berlangsungnya wawancara.

### 5.3 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan terkait transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan *pura khayangan tiga* yaitu sebagai berikut:

#### 5.3.1 Penelitian Selanjutnya

Diharapkan adanya pengembangan yang berkelanjutan bagi peneliti selanjutnya karena pada penelitian ini memiliki keterbatasan waktu dan keterbatasan informan dalam melakukan wawancara oleh karena itu perlu adanya alokasi waktu untuk melakukan wawancara dan menambah informan untuk melakukan wawancara.

#### 5.3.2 Instansi

1. Untuk menelaraskan hubungan yang harmonis antara Tuhan, sesama manusia dan lingkungan seharusnya pengimplementasian konsep *tri hita karana* diterapkan secara maksimal melalui pertanggungjawaban pelaporan keuangan yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
2. Sebaiknya untuk kedepannya pengurus khususnya bendahara membuat laporan keuangan yang lengkap, agar sesuai dengan standar yaitu PSAK 45 yang telah diterapkan di Indonesia meskipun organisasi pura ini tergolong kecil. Karena jika tidak berpedoman pada standar yang berlaku hal ini mempengaruhi tingkat kepercayaan umat mengenai pelaporan keuangan yang dibuat.
3. Untuk mengoptimalkan pertanggungjawaban terkait aktivitas operasional yang dilakukan di *pura khayangan tiga* terutama bendahara banjar, pada saat paruman sebaiknya hasil dari hardcopy laporan keuangan di tempel diareal pura atau di bale gong, sehingga umat yang tidak datang pada saat paruman bisa mengetahui laporan keuangan

tersebut, dan sebaiknya bendahara juga menyebarkan laporan keuangan tersebutke umat yang tidak datang.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustana, G. W., Herawati, N. T., AK, S., Atmadja, A. T., dan SE, A. (2017). Analisis Sumber Dana Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pura Khayangan Tiga Di Desa Pakraman Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Aldiasta, I. M., Atmadja, A. T., SE, A., dan SINARWATI, N. K. (2017). Mengungkap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pelaba Pura Khayangan Tiga (Studi Kasus Pura Khayangan Tiga Desa Pakraman Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Atmadja, Anantawikrama Tungga. (2013). Penyertaan Modal Sosial Dalam Struktur Pengendalian Intern LPD (Studi Kasus Lima LPD Di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*.
- Bastian, Indra. (2005). Akuntansi Sektor Publik. *Jakarta: Penerbit Erlangga*.
- Gray, Rob, and Bebbington Jan. (2006). "NGOs, Civil Society And Accountability: Making The People Accountable To Capital". *Accounting, Auditing & Accountability Journal* , 19(3), 319-348.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 8(1), 1-9.
- Kertih dan Sukandi. (2007). Konsep Ajeg Bali (Hindu) Berbasis Ideologi Tri Hita Karana Dimaknai di Lingkungan Sekolah (Studi Etnografi Pendidikan pada SMA Negeri 1 Ubud Bali sebagai Model SMA Berwawasan Hindu). *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains & Humaniora Undiksha*.
- Lubis, A., Torong, Z. B., dan Muda, I. (2016). The urgency of implementing balanced scorecard system on local government in North Sumatra–Indonesia.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI

- Martha, W. (2014). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Di Kota Bandung (Survey Diinstansi Pemerintah Kota Bandung). Universitas Widyatama.
- Muda, I., Maulana, W., Sakti Siregar, H., dan Indra, N. (2018). The Analysis of Effects of Good Corporate Governance on Earnings Management in Indonesia with Panel Data Approach. *Iranian Economic Review*, 22(2), 599-625.
- Muda, I., Wardani, D. Y., Maksum, A., Lubis, A. F., Bukit, R., dan Abubakar, E. (2017). The Influence Of Human Resources Competency And The Use Of Information Technology On The Quality Of Local Government Financial Report With Regional Accounting System As An Intervening. *Journal of Theoretical & Applied Information Technology*, 95(20).
- Pandu, G. A., Herawati, N. T., AK, S., Atmadja, A. T., dan SE, A. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Dadia yang di Landasi Konsep Budaya Lokal Tri Hita Karana (Studi Kasus Pada Dadia Pasek Tangkas Kori Agung di Desa Pakraman Tegallenga). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1).
- Pertiwi, I. D. A. E., dan Ludigdo, U. (2013). Implementasi Corporate Social Responsibility Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 430-455.
- Purana, i. m. (2016). Pelaksanaan Tri Hita Karana Dalam Kehidupan Umat Hindu. *Widya Accarya*, 5(1).
- Robbins. P.S. (2002). Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi. Edisi kelima. Surabaya: Aksara 1.
- Rosjidi. (2001). Akuntansi Sektor Pemerintahan: Kerangka, Standar, dan Metode. Surabaya: Aksara 1.
- Stevenson William J. (2002). Operation Manajemen. 7th Edition. *Mc Graw Hill, New York*.
- Surpha, I Wayan. (2002). Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali. Denpasar: *Pustaka Bali Post*.

Wati, N. L. Y., Atmadja, A. T., SE, A., Herawati, N. T., dan AK, S. (2017).  
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Air Desa Sebagai  
Pendapatan Tambahan pada Pura Desa Banyuning. *JIMAT (Jurnal Ilmiah  
Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1).





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## LAMPIRAN 1 DAFTAR PERTANYAAN

### 1.1 Pertanyaan untuk Pemangku

1. Bagaimana sejarah terbentuknya pura ini?
2. Apakah anda terlibat dalam proses pengelolaan keuangan?
3. Apakah anda terlibat dalam memilih pengurus untuk pengurus pura?
4. Menurut anda apakah pengurus pura ini dalam melakukan pengelolaan keuangan sudah baik?

### 1.2 Pertanyaan untuk Kelian Adat

1. Sudah berapa lama menjabat sebagai kelian?
2. Apakah ada unsur paksaan menjadi kelian?
3. Apakah anda tau mengenai sumber dana atau pendapatan pura khayangan tiga ini?
4. Darimana saja sumber dana atau pendapatan tersebut?
5. Bagaimana proses pengelolaan keuangan pada saat bapak menjabat sebagai kelian?
6. Apakah saat anda menjabat sebagai kelian pengelolaan keuangan masih manual atau sudah pakai komputer?
7. Menurut anda apakah pengelolaan keuangan di pura ini sudah bisa dikatakan baik?
8. Apakah diterapkan juga konsep tri hita karena di pura khayangan tiga ini secara khusus?
9. Bagaimana cara mengklasifikasikan dan membedakan dari *prahyangan*, *pawongan* dan *palemahan*?
10. Mengenai penyusunan anggaran untuk pura ini seperti apa?
11. Apakah pernah terjadi masalah keuangan seperti kekurangan anggaran saat melakukan kegiatan?
12. Bagaimana prosedur pertanggungjawabannya mengenai pengelolaan keuangan terkait menjaga transparansi dan akuntabilitas?
13. Setiap kapan mengadakan rapat atau sangkepan pura?

14. Menurut anda apakah laporan pertanggungjawaban itu penting?

### 1.3 Pertanyaan untuk Bendahara

1. Apakah anda tahu sumber dana atau pendapatan di pura ini darimana saja?
2. Dari sumber pendapatan tersebut dikelola untuk apa saja?
3. Apakah dalam mengelola keuangan pura ini perlu mencatat anggaran terlebih dahulu? Dalam bentuk apa pencatatannya?
4. Apa ada persentase tertentu atau jumlah tertentu untuk pemungutan iuranya?
5. Prosedur pencatatan pengelolaan keuangannya bagaimana?
6. Bagaimana pengalokasian sumber pendapatan dalam konsep *tri hita karana* dalam penyusunan program kerja?
7. Bagaimana proses pengelolaan keuangan dalam konsep *tri hita karana*?
8. Apakah pernah ada kekurangan atau kelebihan dalam penerapan menggunakan dana yang dianggarkan?
9. Siapa pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan pelaporannya?
10. Siapa yang memeriksa keuangan atau yang mengawasi?
11. Untuk mengelola keuangan pura tahun berikutnya apa perlu merancang anggaran lagi?
12. Bagaimana prosedur pertanggungjawabannya mengenai pengelolaan keuangan terkait menjaga transparansi dan akuntabilitas?
13. Kepada siapa saja melaporkan pertanggungjawaban keuangan?
14. Kapan laporan pertanggungjawaban dilakukan?

### 1.4 Pertanyaan untuk Umat

1. Apakah laporan pertanggungjawaban *pura kayangan tiga* penting?
2. Apakah anda mendapatkan laporan keuangan dari pengurus?

3. Menurut anda apakah pengelolaan keuangan di *pura khayangan tiga* ini sudah transparan?
4. Apakah anda pernah kesulitan dalam memahami laporan keuangan yang dibuat?
5. Apakah anda percaya dan puas dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus di *pura khayangan tiga* ini?
6. Apakah anda mempunyai keluhan terkait pengelolaan keuangan pura?



**LAMPIRAN 2 TRANSKRIP WAWANCARA**

**Iforman : Pemangku Adat di Desa Pakraman Patoman**

**Tempat : Pura Desa dan Puseh**

**Hari/tanggal : Sabtu/ 14 September 2019**

**Waktu : 19.19 WIB**

G: Bagaimana sejarah berdirinya pura khayangan tiga ini?

E: Kalau sejarah saya kurang tau bagaimana, dulu awalnya di banyuwangi makalne odalane to patuh. Tahun '31 ya ngae candi kori agung bapan tiyang umur 15 tahun, ne candi bentar ne tahun 31 ngae pertama. Memang dari awal uning tyang kori ne be ade. Tanah ini dulunya termasuk keluarga tyang pada waktu itu keluarga tyang memula jagung di berasan, setiap ditu ilang gen jagung to. Kadenano celeng ternyata jelema, jadi mbah tyang ngelah sesangi amun nyak sampek urusan menek nengaturang tempat ne. Kalau pura dalem, dulu dibentengan. Karena ada pemekaran desa akhirnya pindahke desa patoman kira-kira tahun 1995 terus 1998 ngeteg linggih. Pidan tyang mewinten ditu.

**Iforman : I Gusti Putu Sudana (Kelian Adat di Desa Pakraman Patoman)**

**Tempat : Teras Rumah Bapak I Gusti Putu Sudana**

**Hari/tanggal : Minggu/ 15 September 2019**

**Waktu : 10.24 WIB**

G: Gimana sejarah terbentuknya desa pakraman patoman hingga ada pura khayangan tiga?

E: Yen ceritane pidan to kone pindahan teko banyuwangi, jadi pindahan dari banyuwangi orang penduduk bali dari 1830 be ado di banyuwangi, akhirnya untuk mencari...tempat karena penglisir mencari tempat, akhirnya melebarkan ke patoman. Nah, yen di patoman terjadi perpindahan

banyuwangi, termasuk orang-orang yang keselong dalam arti kasta perempuan lebih tinggi diatas kawin dengan kasta laki yang lebih rendah akhirnya banyak buangan dari bali ke patoman. akhirnya membuat pura, pak putu dini mare taun '98. Terus terjadi khayangan tiga, dulu arti 1989 ada pura khayangan tiga dimana suatu pura khayangan tiga di desa pakraman patoman yaitu satu pura desa, pura puseh, dan pura dalem. Disamping itu ada juga pura-pura yang ada di patoman, ada pura taman, pura bale gong untuk pagerwesi dan pura prajapati. Pura desa yaitu pura yang dimana pelinggihnya pemujaan dari pencipta yaitu dewa brahma dan saktinya saraswati, pura puseh pemujaan dewa wisnu dan saktinya dewi laksmi sebagai pemelihara, selanjutnya pura dalam pemujaan dewa siwa dan saktinya dewi durga. Pura taman sebagai pensucian dari manusia sampai dewa atau sebagai beji, pura bale gong untuk pagerwesi dilaksanakan 6 bulan sekali, pura prajapati yaitu untuk kuburan.

G: Berapa luas wilayah untuk pura khayangan tiga?

E: Nah dikira-kirakan...diperkirakan pura puseh ada  $25m^2 \times 30m^2$  pura dalem yen sing pelih pak putu to  $25m^2 \times 25m^2$ .

G: Bagaimana proses menjadi kelian adat? Sudah berapa lama menjabat?

E: Proses menjadi kelian, kelian prosesnya adalah dipilih dari masyarakat dengan ketentuan menjadi kelian, satu mampu dibidang upakara, dua mampu untuk membina atau memimpin masyarakat, yang ketiga mampu mampu untuk melengkapi bangunan khayangan tiga atau kelengkapan desa pakraman, sudah 3 tahun menjabat dari 5 tahun. Tidak ada tunjangan sama sekali, ikhlas.

G: Apakah bapak terlibat dalam membuat laporan keuangan?

E: Dalam membuat laporan keuangan dimana ada kriteria dalam laporan keuangan, satu dibidang pembangunan, kedua tentang upakara piodalan, ketiga upakara pengabenan. Pak kelian dalam bidang laporan keuangan hanya bisa mengarahkan, memantau sesuai bagian masing-masing diserahkan penuh kepada bendahara banjar, dan bendahara kepanitian per event.

G: Sumber dana pura khayangan tiga darimana?

E: Sumber dana pura khayangan tiga pertama puseh, desa dari swadaya masyarakat (urunan) 60% masyarakat 40% pemerintah, contoh kori keto ya, ini sama patuh buat pura dalem ketiga to be pura puseh, desa, dalem. 60% ne emang iuran banjar. Pemerintah ne ngajukan proposal. Urunan ne per event, pembangunan kan gak mungkin. Kalau setiap membangun ada klasifikasi A minimal 300, B minimal 200, C minimal 100. Untuk tipe a kalangan menengah atas ya, yang b menengah, yang c biasa-biasa aja. Dana punia juga ada, sumbangan juga ada dari masyarakat lain. Ada bantuan sosial tapakan dari bali barong, rangde termasuk topeng sidakarya, pertama pratima saraswati di puseh. Dana punia secara tulus ikhlas, jarang disebutkan namanya. Setiap keuangan di desa pakraman itu baik pemerintahan dan non pemerintahan. Kalau di dalam pemerintahan berarti mengajukan proposal dalam anggaran besar, sebelum mengajukan anggaran besar kita butuh dana mengambil keuangan dari bendahara banjar. Kalau baru kemarin 100.000.000 tahun 2018 dana turun, untuk pembangunan candi bentar pura. Ketua pembangunan dan staf melaksanakan penuh pelaksanaannya atas dana itu dibawah pengawasan bapak parisadha, kelian adat dan kelian dinas setelah itu baru ada pertanggungjawaban. Kita membuat laporan lewat konsultan.

G: Proses pengelolaan keuangan di desa pakraman patoman bagaimana?

E: Proses pengelolaan keuangan banjar patoman aaa setiap ada kegiatan upakara semua sisa dari upakara, dijadikan satu di bendahara banjar. Setiap ada kegiatan dari pembangunan termasuk pengabenan sisa diserahkan kepada bendahara banjar. Kalau ada pembangunan kalau ada kegiatan baik itu pembangunan, upakara, termasuk tirta yatra, sumbangan kepada luar semua dari bendahara perintah dari parisadha desa, kelian adat, dan kelian dinas baru bendahara ngeluarkan

G: Apa pentingnya struktur organisasi?

E: Struktur organisasi ada kedinasan dan desa pakraman. untuk dinas ada kelian dinas membawahi rt/rw. Sudah itu mempunyai keamanan hansip ya. untuk desa pakraman.....

G: Untuk wilayah tempek dimana saja pak?

E: Untuk tempek1 di paling utara, tempek tengah di wilayah tengah, tempek 3 di sebelah selatan, tempek 4 paling pinggir pakraman, dan tempek 5 di seberang jalan. Ketua tempek 1 made suprapta, tempek 2 guru gontot, tempek 3 dek tuuu, tempek 4 gede suparsa, tempek5 made sumantri.

G: Menurut bapak, pengelola keuangan desa pakraman sudah dikatakan baik apa belum?

E: Pengelola keuangan desa belum, nah gini karena income yang masuk tidak ada jadi apa yang diolah cuman dari 3 tadi iuran, dana punia, bantuan sosial. Jadi keuangan kurang...

G: Untuk prahyangan sendiri dalam melaksankannya kegiatan di pura khayngan tiga bagaimana?

E: Kalau nah prahyangan, umat pakraman setiap 6 bulan sekali dia melaksanakan piodalan di waktu tumpek wayang, kalau di dalem wuku tolu. Pertama, pada saat di pura puseh desa iuran untuk upakara piodalan setingkat upakara pulo gembal dana kurang lebih 12.000.000 per odalan sekali. Pura dalem sama 50.000 jadi kalau ada tambahan lagi yaitu saraswati dan pagerwesi itu 2 kali itu. Untuk dalem sama 12.000.000 termasuk nyepi kemarin 10.000.000 ogoh-ogoh. Jadi setiap mau upakara 6 bulan sekali itu ada peturunan 50.000 puseh dan desa, 50.000 saraswati pagerwesi. 50.000 dalem. Selama 6 bulan 3 kali upakara kena iuran masyarakat per orang 150.000 dan ditambah nyepi 50.000 jadi 6 bulan 150.000 dan 1 tahun 200.000. untuk upacara tidak ada pengecualian karena ikhlas, karena prahyangan.

G: Kalau pawongan bagaimana?

E: Kalau pawongankan jelemane, masalah pawongan adalah gotong royong bersama sama selama ada upakara termasuk ngayah dipura atau dikematian. Untuk warga yang di patoman yang nyari kerja di bali, iuran

wajib sama kalau kegiatan ditoleransi jadi keuangannya dibayar oleh keluarganya, nanti laporannya setiap kegiatan upacara di pura atau dimanapun pembangunan, upacara, pengabenan di masyarakat adanya pesamuan untuk membahas kegiatan. Jadi pemasukan dan pengeluaran sisa atau tidak sisa, semua dihadapan masyarakat dan yang dibali di sampaikan oleh keluarganya yang ada di patoman. yen di print baner karena pengeluaran tidak terduga. Dan semua perincian di print tidak di baner di dalam kepanitiaan.

G: Menurut bapak sudah transparan apa belum pengelolaan keuangannya?

E: Sudah transparan, karena gini print baner itu karena upacara beda dengan yang lain. Sudah bisa di pertanggungjawabkan sudah akuntabel. Hasil daripada print tanpa baner sah dipertanggungjawabkan dimuka umum di masyarakat pada saat pesamuan kurang lebih 10 hari setelah upacara dan dikatakan sah. Karena pengeluaran dalam upacara tidak bisa diprediksi, karena biaya tergantung harga pasar.

G: Untuk palemahan sendiri bagaimana?

E: Kalau palemahan sudah terlaksana, karena punya pintu masuk semua pekarangan di pagar. Dipura sudah 3 mandala, pertama utama mandala, madya mandala, nistaning mandala.

G: Apa saja aktivitas operasional yang dilakukan:

E: Di pakraman patoman, dibagi 5 tempek, setiap kejakan dilakukan per tempek contoh tempek 1 dari piodalan upacara puseh, desa, dalem na ini. Itu dikerjakan tiap tempek sekali puteran. Selanjutnya pertemuan masyarakat umum membahas tentang upacara termasuk iuran wajib, habis pertemuan di bentuk panitia mencakupi upacara puseh, desa, pagerwesi malu, bale gong dan dalem. Ini satu siklus sudah. Terbentuk panitia piodalan terdiri dari sekretaris, bendahara, dan seksi seksi. Untuk iuran bayar di bendahara tempek sesuai angket, seminggu sebelum odalan pakraman atau masyarakat ngayah bersama atau gotong royong untuk membuat kelengkapandari alat-alat upacara termasuk surya, penjor, sanggah cucuk, - 4 hari odalan ibu sarati dibantu ibu masyarakat ngayah membuat upacara

jejahitan banten, canang sari. Kurang 1 hari bapak-bapak dan ibu-ibunya juga ngayah untuk melengkapi upakara besok pada acara puncak besok membuat sate bunga, caru, lawar, mebad. Habis itu upacara puncak. Upacara pencok ada tari-tarian dan terakhir sembhyang. Selesai odalan, sebelum laporan kurang 1 minggu ketua panitia dan staf membuat perincian pemasukan dan pengeluaran di dalam proses upakara piodalan semua tanggung jawab panitia odalan. Terakhir pada saat sangkep baru mempertanggungjawabkan dalam upakara. Sebelum upakara bapak kelian adat, bapak parisadha, bapak kelian dinas, pemangku dan serati membuat RAB yang mungkin kira-kira habis 12.000.000 setelah itu baru ada pesamuan.

G: Menurut bapak pertanggungjawaban itu penting atau tidak?

E: Setiap pertanggungjawaban apapun baik itu pembangunan, upakara, pengabenan sangat penting sekali di hadapan publik atau masyarakat pada saat pesamuan dan disaksikan dan diterima oleh 3 pejabat yaitu kelian adat, kelian dinas dan parisadha. Jadi sangat penting pertanggungjawaban supaya tidak ada krisis kepercayaan.

G: Apakah pernah mengalami kekurangan anggaran?

E: Masalah kekurangan anggaran belum pernah terjadi, karena sebelumnya karena sudah di perhitungkan sebelumnya. Apabila terjadi kekurangan biasanya terjadi lonjakan barang yang naik lebih 10 % kekurangan ditanggung bendahara banjar. Bendahara banjar meminta persetujuan kelian adat. Iuran tidak perlu dikasih kwitansi, karena sudah ada arsip. Dia bayar sudah tertulis.

**Iforman : Made Mudiara (Bendahara di Desa Pakraman Patoman)**

**Tempat : Halaman Rumah Bapak Made Mudiara**

**Hari/tanggal : Minggu/ 15 September 2019**

**Waktu : 17.52 WIB**

G: Sumber dana pendapatan pura darimana?

E: Uli swadaya.. swadaya masyarakat/umat,dari proposal bantuan pemerintah dalam hal fisik pembangunan, kalau masalah upakara... upacara tidak ada itu dari iuran, ada juga dari bantuan sosial

G: Untuk iuran itu berapa?

E: Eee.... yang berjalan sementara ini di odalan khayangan tiga itu rata-rata 150-200 ribu per kk per tahun,

G: Apakah selain dari itu ada tambahan lagi untuk pendapatan?

E: Tambahan itu... masalah mulai pesamuan tanggal 13 kemarin ada awig baru yang namanya apabila tidak mengikuti kewajiban-kewajiban umat kususnya itu seperti kerja bakti di pura, pekemitan, ngayah itu dikenakan sanksi, sangsinya 20 ribu. Selain itu dana punia dari masyarakat secara tulus ikhlas.

G: Sumber dana ini dikelola untuk apa saja?

E: Kalau sumber dana yang dikelola itu untuk ini... untuk upakara, kedua untuk pembayaran atau perawatan ini..pura seperti bayar listrik, terus.... pembersihan...eee bersih bersih rumput.

G: Apakah dalam menggunakan uang tersebut langsung dikeluarkan apa bagaimana?

E: Dikeluarkan langsung, minta persetujuan parisadha dan kelian..

G: Dalam menggunakan keuangan menentukan RAB terlebih dahulu apa tidak?

E: Menentukan RAB dulu. Pasti... segala sesuatu yang mau dilakukan itu kita harus..eeee... koching namanya itu, mempersiapkan dulu RAB nya itu estimasi...eee.... untuk kegiatan tersebut itu maksimal berapa,

G: Untuk pemungutan iuran, apakah ada presentase tertentu?

E: Kalau untuk upakara.... itu tidak ada, semua sama rata, untuk orang gak mamp....aaa...itu nanti ada kiss by kiss dala arti gini..eeee... panitia atau staf banjar ini melihat...eee... situasi dan keadaan pada saat itu umat bagaimana, ada..beberapa orang yang bayarnya berapapun yang dia bayar karena melihat satu, dia itu sudah jompo artinya gitu, kalau umur itu kira-kira masih diangka 70 keatas, kalau masih statusnya sebagai kepala rumah tangga, tetap dikenakan tetapi dengan tulus ikhlas tidak ada paksaan berapapun nominalnya..

G: Untuk prosedur pencatatan laporan keuangan bagaimana?

E: Jadi kita.. untuk masalah karena di banjar kita terbentuk tempek, tempek adalah suatu kumpulan masyarakat sesuai dengan geografisnya. Artinya gitu... aaaa yang mana ada lima tempek khususnya di banjar patoman, jadi....untuk pelaksanaan atau pertanggungjawabannya itu tempek yang bertugas aaaaaa memberikan nanti laporan itu untuk pemungukan biaya untuk upaka itu, ditugaskan kepada ketua tempek masing-masing, nanti dikumpulkan ke bendahara tempek yang bertugas. Ya... setelah upakara selesai, barulah ketua tempek yang bertugas dan beserta stafnya itu melaporkan untuk pertanggungjawabannya.

G: Untuk laporannya, bapak bikin laporan apa saja?

E: Eeeee buku satu buku besar meliputi masukan dan pengeluaran, jadi, termasuk buku hariann,, jadi, apabila adake butuhan yang sangat mandatori kita bukukan disana.

G: Untuk pencatatannya masih manual berarti?

E: Manuallll, pencatatan masih manuall....

G: Untuk pertanggungjawaban bagaimana sistemnya?

E: Pertanggungjawaban dilaksanakan pada saat pesamuan, aaaa pesamuan itu sistemnya segala sesuatu pengeluaran terhadap kegiatan tersebut itu dibukukan, nahh... nanti aaa nanti aaaa disebarkan aaaa dibukukan itu nanti di fotocopy dikasih selebaran-selebaran itu terhadap umat semuanya. Khusus tempek 5, ada selebaran yang di print. Mudah-mudahanlah ini bertahan.

G: Dalam melaksanakan kegiatan di pura menggunakan tri hita karena, apakah konsep prahyangan sudah maksimal?

E: Selama saya menjabat, dalam hal pengeluaran itu saya buat seefektif mungkin, jadi sesuai dengan kebutuhan., aaaa akir dari hal-hal tersebut makanya untuk banjar pada saat ini memiliki kas yang cukup dari periode sebelumnya, untuk sekarang kurang lebih 29.000.000 ini uang kelebihan dari kegiatan kegiatan tersebut.

G: Siapa saja pihak yang terlibat dalam melaporkan keuangan?

E: Yang terlibat dalam pengelolaan keuangan untuk upakara, yang awal itu adalah tempek yang bertugas setelah selesai melakukan kegiatan upakara tersebut, tempek itu LPJ nya ke bendahara banjar saya sendiri. Oo iya pasti, diketahui kelian adat dan parisadha.

G: Ada tidak untuk saat ini yang memeriksa keuangan?

E: Untuk sementara ini yang mengawasi tidak ada, nanti ada pelaporan keuangan pada saat pesamuan tersebut. Intinya gitu, auditornya masih belum ada.

G: Menurut bapak, laporan pertanggungjawaban ini penting atau tidak?

E: Sangat penting, aaaa laporan LPJ itu sangat penting, Tujuannya adalah kita itu mereview atau menganalisis kegiatan tersebut secara aktualnya itu sesuai gak dengan apa yang sudah kita lakukan intinya gitu.

G: Untuk saat ini pernah atau tidak ada yang mengeluh mungkin ada yang curiga?

E: Kalau pada saat ini, yang selama yang saya pegang itu masyarakat itu sangat antusias sekali dalam hal dana tersebut karena melihat di periode sebelum saya itu dana yang waktu aaa laporan yang pada saat serah terima itu hanya 4.000.000 setelah adanya aaaa staf baru dari pemilihan oleh banjar kita berkomitmen bahwa aaa kita sebagai amanah masyarakat khususnya kita harus melakukan sesuai dengan kebutuhan dan..... tidak mengurangi apayang sudah menjadi dodonan acara tersebut. Dalam arti upakara itu, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh berlebihan artinya gitu tadi disesuaikan dengan kebutuhan, makanya dana bisa lebih itu kan tergantung panitia ini, bisa betul-betul efektif gak intinya gitu.

G: Bagaimana proses transparansi dan akutabel sudah dilakukan

E: Eeee.. sama itu akuntabelnya, saya laporkan,,saya bukukan, yang satunya apa tuu. Untuk transparansi setiap pesamuan kita sampaikan saldo akhirnya. Pesamuan LPJ itu kita lakukan adalah setelah upakara di desa ini selesai setiap tahun sekali, karena gini..aaa.. karennagini,piodalan antara yaaaaa 6 bulan sekali, sorry disini pakai tumpek.

G: Apakah mungkin ada terobosan baru untuk kedepan seperti di cetak baner?

E: Eeeee sebetulnya itu adalah misi saya pada saat menjabat sebagai bendahara, nah...tetapi setiap panitia itu mempunyai SDM yang berbeda-beda aaa

intinya gitu, jadi kita terhalang atau terhambat dari SDM panitia tersebut karena panitia tersebut bergulir sesuai tempek yang bertugas atau jatah intinya gitu, menurut aaaa kurun waktu yang ditentukan, untuk saat ini belum tetapi untuk kedepannya pasti, bagus sekali itu.

G: Berapa tahun menjabat?

E: Perkiraan 3 tahun

G: Untuk aktivitas operasional yang dilakukan apa saja dari awal sampai akhir?

E: Yang dilakukan awal adalah pendataan umat secara kuantitas berapa, nanti dijumlahkan berapa, habis itu diserahkan ke ketua tempek masing-masing untuk memungut apa namanya itu eeeee apa namanya iuran, habis di pungut diserahkan ke bendahara tempek yang bertugas, selanjutnya bendahara tempek melakukan kegiatan upakara tersebut sampai selesai, setelah itu bendahara tempek baru melaporkan ke banjar.

G: Untuk menggunakan SOP dalam pengelolaan keuangan?

E:hmmm.. pada saat perencanaan itu.

G: Apakah ada keterlibatan seluruh dalam pengambilan keputusan?

E: ohh ya...pada saat pelaporan. pesamuan itu rapar akhir.

**Iforman : Kayan Yudiasa (Umat di Desa Pakraman Patoman)**

**Tempat : Pura Desa dan Puseh**

**Hari/tanggal : Sabtu/ 14 September 2019**

**Waktu : 19.19 WIB**

G: Menurut bapak sudah transparan atau belum laporan keuangan pura khayangan tiga ini?

E: Sudah, paling sudah jani

G: Penting tidak pengelola keuangan melakukan pertanggungjawaban?

E: Perlu, karena setiap sesuatu itu kan perlu dipertanggungjawabkan apalagi berkaitan dengan uang masyarakat uang banjar,kan perlu di pertanggungjawabkan. Umpamanya ada kegiatan piodalan kan setiap umat

dilibatkan berkaitan dengan dana makanya kan perlu dipertanggungjawabkan pada saat setelah piodalan tersebut dibacakan biaya dan lain sebagainya.

G: Sumber dana pura khayangan tiga ini darimana saja?

E: Dari umat, iuran, dana punia, bantuan sosial untuk piodalan sementara belum, tetapi untuk pembangunan pura ada. Iuran ditentukan 200 ribu satu tahun per KK untuk tiga pura, termasuk upacara yang lainnya seperti nyepi, pagerwesi, saraswati, galungan, kuningan. Kalau tidak mampu diberikan keringanan hanya membayar 50% dari yang ditentukan. Usia yang tidak produktif itu dibebaskan dari iuran untuk kegiatan keagamaan di pura.

G: Bagaimana pelaksanaan terkait prahyangan dalam pura khayangan tiga?

E: Memang satu banjar ya kayak gini ada pura puseh, pura desa dan pura dalem. Sudah transparan segala kegiatan yang berkaitan dengan prahyangan-prahyangan tersebut sudah transparan. Bisa di pertanggungjawabkan karena masing-masing ada laporannya. Apalagi ini kaitannya sama hyang widhi jadi harus dilaporkan, karena kalau tidak pasti akan mendapat karma dan dosa karena ini terkait horizontal dan vertikal.

G: Untuk pawongan sendiri apa sudah berjalan maksimal?

E: Ngayah, sebelum melaksanakan upacara yadnya dalam rangka membuat banten dan lainnya dan laporan sudah dibuat oleh panitianya per tempek. Segala kegiatan dihandel oleh tempek dibantu oleh banjar.

G: Terkait pawongan, ada orang yang tidak bertempat tinggal di desa, itu seperti apa?

E: Sama juga itu dikenakan, setiap ada kegiatan ada laporan pertanggungjawaban pada sangkep banjar itu. Di dalam sangkep dibacakan di print ada juga emang harus seperti itu sekarang, untuk di print baru tempek 5 ini. Karena masyarakat sudah percaya terkait pada waktu sangkep maka hasil yang sudah ada dipercaya. Dari sekian banyak banjar pasti ada yang kurang puas, maka ada laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan.

G: Untuk palemahan sendiri sudah maksimal apa belum?

E: Dari kegiatan yang sudah di laporkan, kalau kegiatan dipura pasti ada kegiatan makan minum, berkaitan dengan tenaga tadi itu, untuk tempat sampah

biasanya ada dari sumbangan kalau listrik, sumur, kabel, air baru ada. Kalau kecil banyak yang dana punya karena ini berkaitan dengan bhakti harus maksimal.

**Iforman : Nengah Widarti (Umat di Desa Pakraman Patoman)**

**Tempat : Ruang Tamu Ibu Nengah Widarti**

**Hari/tanggal : Senin/ 16 September 2019**

**Waktu : 11.08 WIB**

G: Nama ibu siapa?

E: Nengah widarti

G: Saya disini ingin menanyakan, untuk melaksanakan kegiatan di pura khayangan tiga itu dikenakan iuran? Berapa?

E: Kena iuran itu.. 150 ribu itu untuk tiga pura setiap enam bulan sekali per KK

G: Apakah laporan keuangan yang dibuat dipertanggungjawabkan ibu?

E: Iya, biasanya dipertanggungjawabkan biasanya itu pas..... piodalan itu panitia mengumumkan pengeluaran secara mendetail.

G: Saya menanyakan terkait tri hita karena dalam pura khayangan tiga untuk prahyangan, pawongan dan palemahan. Untuk prahyangan diwujudkan dalam bentuk apa? Apa sudah berjalan maksimal?

E: Sudah... semua sudah berjalan maksimal, dalam bentuk pelaksanaan piodalan dilaksanakan 6 bulan sekali, kalau nyepi 1 tahun sekali.

G: Yang kedua saya menanyakan pawongan, untuk pawongan sendiri sudah berjalan maksimal apa belum di desa pakraman patoman ini?

E: Sudah, sudah berjalan, dalam bentuk kita ngayah bersama

G: Selanjutnya terkait laporan keuangan, apakah pengelola keuangan sudah mempertanggungjawabkan dengan baik?

E: Sudah, sudah karena setiap ada apa... kegiatan piodalan itu panitia selalu melaporkan pertanggungjawaban keuangannya, sudah itu...setelah acara selesaipun ada lagi pertanggungjawaban keuangan disana tu hasilnya biasanya di print dan alangkah baiknya ditempel agar semua masyarakat bisa

membacanya, karena sementara ini hanya di print dan dibagikan tapi.. untuk laporan keuangan sudah dilaporkan secara rinci dan mendetail.

G: Untuk konsep palemahan sendiri, bagaimana?

E: Sudah, sudah berjalan dengan lancar.. setiap, setiap sebelum mengadakan upacara piodalan dilakukan pecaruan terlebih dahulu, setelah itu kita adakan bersih-bersih lingkungan pura..

**Iforman : Nengah Diantara (Umat di Desa Pakraman Patoman)**

**Tempat : Teras Rumah Bapak Nengah Diantara**

**Hari/tanggal : Senin/ 16 September 2019**

**Waktu : 11.21 WIB**

G: Nama bapak siapa?

E: Nengah Diantara

G: Apakah dalam melaksanakan kegiatan di pura khayangan tiga ada iuran atau tidak?

E: Pasti, lek kan sudah masuk KK, iuran per 6 bulan, per odalan itu 200 ribu itu kompit sama pura puseh dan desa, pura dalem, nyepi sama di bale gong setiap 6 bulan sekali.

G: Menurut bapak apakah penting ada laporan keuangan?

E: Ya penting, kan lek udah masuk KK dan lek pingin tau berapa pengeluaran setiap piodalan itu, karena lek kan ikut iuran dan masyarakat semua tau terkait keuangan dari bendahara banjar.

G: Terkait dengan tri hita karena, di dalam melaksanakan kegiatan pura menggunakan tri hita karena yaitu ada tiga prahyangan, pawongan dan palemahan. Untuk prahyangan sendiri apakah sudah maksimal dilakukan?

E: Mungkin sudah astungkara, dalam bentuk odalan dan acara-acara adat yang sudah dijalankan, sudah maksimallah kurang lebih.

G: Untuk pawongan apakah sudah maksimal dalam pelaksanaannya?

E: Kira-kira sudah, pelaksanaan dalam bentuk ngayah,

G: Ini terkait dengan pelaporan keuangan, apakah bapak hadir pada saat paruman?

E: Jujur ya.....gak pernah. Untuk mengatasi ini ya.... alangkah baiknya diprint atau dibuatkan sejenis laporan dan disebarakan untuk orang-orang yang tidak datang atau ada kesibukan lain, pada saat sekarang kan jamannya online.

G: Untuk palemahan sendiri apakah berjalan maksimal?

E: Ehmmm....mungkin, dalam bentuk bersih-bersih lingkungan...sering sih..sering pada saat piodalan

**Iforman : Made Usiani (Umat di Desa Pakraman Patoman)**

**Tempat : Halaman Rumah Ibu Made Usiani**

**Hari/tanggal : Selasa/ 17 September 2019**

**Waktu : 06.49 WIB**

G: Nama ibu siapa?

E: Made usiani

G: Dalam melaksanakan kegiatan di pura khayangan tiga itu apakah ibu dikenakan iuran?

E : Iya kena, 200-250 per kk

G: Untuk iuran itu dikenakan berapa bulan/ tahun sekali

E: Per 6 bulan sekali mendekati piodalan

G: Apakah laporan keuangan itu penting dibuat? Kenapa?

E: Iya harus, karena itu uang orang banyak agar tidak ada kecemburuan sosial

G: Dalam melaksanakan kegiatan di pura pasti menggunakan tri hita karana, untuk prahyangan sendiri apakah berjalan dengan maksimal?

E: Sudah, dalam bentuk piodalan, nyepi, pagerwesi.

G: Untuk pawongan ibu, apakah sudah berjalan dengan baik?

E: Sudah, ngayah, mejejaitan dilaksanakan pada saat piodalan

G: Ini terkait pawongan sendiri, diketahui bahwa pawongan adalah menciptakan hubungan selaras antara manusia dengan manusia, agar tidak ada pertikaian. Maka saya kaitkan dengan laporan keuangan ibu. Apakah bendahara sendiri sudah transparan dan akuntabel belum dalam pelaporannya?

E: Sudah, laporan pertanggungjawaban dilakukan pada saat pesangkepan dan saat piodalan. Tetapi dalam pesangkepan ada yang hadir dan tidak. Selaku bendahara seharusnya menempel dan mengeprint hasil dari kegiatan itu untuk melaporkan keuangan secara rinci.

G: Jadi untuk mengatasi masyarakat yang tidak hadir seharusnya bendahara mengeprint dan menempel hasil laporan keuangan ya ibu?

E: Iya, karena pada saat itu kan masyarakat ada yang hadir dan ada yang tidak

G: Ini yang ketiga ada palemahan ibu, untuk palemahan sendiri apakah berjalan dengan maksimal?

E : Sudah, ini dalam bentuk pecaruan dan bersih bersih pura yang dilakukan pada saat mau piodalan dan selesai piodalan.

**LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI OBJEK PENELITIAN**



**Gambar 1.** Pura Puseh Desa Pakraman Patoman, Kecamatan Blimbingsari (Foto di Ambil di Lokasi Penelitian Pada Tanggal 18 April 2019 Pukul 16.59 WIB)



**Gambar 2.** Pura Desa Desa Pakraman Patoman, Kecamatan Blimbingsari (Foto di Ambil di Lokasi Penelitian Pada Tanggal 18 April 2019 Pukul 16.58 WIB)



**Gambar 3.** Pura Dalem Desa Pakraman Patoman, Kecamatan Blimbingsari (Foto di Ambil di Lokasi Penelitian Pada Tanggal 16 September 2019 Pukul 11.36 WIB)

**LAMPIRAN 4 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PEMERINTAHAN TAHUN 2018**



NO	REKAPITULASI / URAIAN BARANG	UNIT	QUANTITAS	UNIT PRICE	TOTAL VALUE
A	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
B	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
C	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
D	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				

NO	REKAPITULASI / URAIAN BARANG	UNIT	QUANTITAS	UNIT PRICE	TOTAL VALUE
11	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
12	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
13	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
14	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
15	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
16	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
17	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
18	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
19	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
20	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
21	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
22	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
23	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
24	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
25	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
26	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
27	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
28	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
29	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
30	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
31	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
32	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
33	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
34	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
35	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
36	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
37	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
38	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
39	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
40	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
41	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
42	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
43	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
44	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
45	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
46	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
47	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
48	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
49	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				
50	REKAPITULASI / URAIAN BARANG				

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya  
Tahun Anggaran 2018

Pembangunan Candi Bentar, Pagar dan Bale Kukul  
Desa Patoman, Kec. Bimbingsari, Kab. Banyuwangi

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	CTN	HARGA SATUAN	JUMLAH
<b>A. PEMBANGUNAN CANDI BENTAR</b>					
1	Pak. Pondasi Lantai	100,000	m <sup>2</sup>	Rp. 14,000.00	Rp. 1,400,000.00
2	Pak. Lantai Bata Merah	10,000	m <sup>2</sup>	Rp. 80,000.00	Rp. 800,000.00
3	Pak. Gorden Tanah		m <sup>2</sup>	Rp. 80,000.00	Rp. 1,677,000.00
4	Pak. Urugan Tanah Kambuh		m <sup>2</sup>	Rp. 21,000.00	Rp. 21,000.00
5	Pak. Urugan Pasir 0.5 Berat gandum		m <sup>2</sup>	Rp. 21,000.00	Rp. 21,000.00
6	Pak. Pemasangan Batu Bata (Dinding Candi) 1 PC : 5 MP		m <sup>2</sup>	Rp. 200,000.00	Rp. 200,000.00
7	Pak. Pemasangan Batu Bata (1/2 tebal, Candi) 1 PC : 5 MP		m <sup>2</sup>	Rp. 400,000.00	Rp. 400,000.00
8	Pak. Pemasangan Dinding Dengan Mutu Layu		m <sup>2</sup>	Rp. 104,270.00	Rp. 104,270.00
9	Pak. Pemasangan Dinding Dengan Mutu Layu		m <sup>2</sup>	Rp. 48,410.00	Rp. 48,410.00
10	Pak. Pemasangan Pagar Dengan Mutu Layu	4,000	m	Rp. 3,210,000.00	Rp. 12,840,000.00
11	Pak. Pemasangan Lantai Urugan Dinding Pagar	20,000	m <sup>2</sup>	Rp. 1,700,000.00	Rp. 34,000,000.00
					Rp. 38,897,000.00
<b>B. PEMBANGUNAN PAGAR CANDI</b>					
1	Pak. Pondasi Bata Merah	20,000	m <sup>2</sup>	Rp. 80,000.00	Rp. 1,600,000.00
2	Pak. Gorden Tanah		m <sup>2</sup>	Rp. 21,000.00	Rp. 420,000.00
3	Pak. Urugan Tanah Kambuh		m <sup>2</sup>	Rp. 200,000.00	Rp. 400,000.00
4	Pak. Urugan Pasir 0.5 Berat gandum		m <sup>2</sup>	Rp. 200,000.00	Rp. 400,000.00
5	Pak. Pemasangan Batu Bata (Dinding Candi) 1 PC : 5 MP	11,700	m <sup>2</sup>	Rp. 400,000.00	Rp. 4,680,000.00
6	Pak. Pemasangan Batu Bata (1/2 tebal, Candi) 1 PC : 5 MP		m <sup>2</sup>	Rp. 104,270.00	Rp. 1,042,700.00
7	Pak. Pemasangan Dinding Dengan Mutu Layu		m <sup>2</sup>	Rp. 48,410.00	Rp. 48,410.00
8	Pak. Pemasangan Pagar Dengan Mutu Layu	4,000	m	Rp. 3,210,000.00	Rp. 12,840,000.00
9	Pak. Pemasangan Lantai Urugan Dinding Pagar	20,000	m <sup>2</sup>	Rp. 1,700,000.00	Rp. 34,000,000.00
					Rp. 54,991,716.34
<b>C. PEMBANGUNAN BALE KUL-KUL</b>					
1	Pak. Pondasi Bata Merah	12,000	m <sup>2</sup>	Rp. 80,000.00	Rp. 960,000.00
2	Pak. Gorden Tanah	12,000	m <sup>2</sup>	Rp. 80,000.00	Rp. 960,000.00
3	Pak. Urugan Tanah Kambuh	2,000	m <sup>2</sup>	Rp. 21,000.00	Rp. 42,000.00
4	Pak. Urugan Pasir 0.5 Berat gandum	11,400	m <sup>2</sup>	Rp. 200,000.00	Rp. 2,280,000.00
5	Pak. Pemasangan Batu Bata (Dinding Candi) 1 PC : 5 MP		m <sup>2</sup>	Rp. 200,000.00	Rp. 200,000.00
6	Pak. Pemasangan Batu Bata (1/2 tebal, Candi) 1 PC : 5 MP		m <sup>2</sup>	Rp. 104,270.00	Rp. 104,270.00
7	Pak. Pemasangan Dinding Dengan Mutu Layu		m <sup>2</sup>	Rp. 48,410.00	Rp. 48,410.00
8	Pak. Pemasangan Pagar Dengan Mutu Layu	4,000	m	Rp. 3,210,000.00	Rp. 12,840,000.00
9	Pak. Pemasangan Lantai Urugan Dinding Pagar	24,000	m <sup>2</sup>	Rp. 1,700,000.00	Rp. 40,800,000.00
10	Pak. Pemasangan Pagar Dengan Mutu Layu	12,000	m	Rp. 3,210,000.00	Rp. 38,520,000.00
11	Pak. Pemasangan Lantai Urugan Dinding Pagar	8,000	m <sup>2</sup>	Rp. 1,700,000.00	Rp. 13,600,000.00
12	Pak. Pemasangan Pagar Dengan Mutu Layu	4,000	m	Rp. 3,210,000.00	Rp. 12,840,000.00
13	Pak. Pemasangan Lantai Urugan Dinding Pagar	1,000	m <sup>2</sup>	Rp. 11,200,000.00	Rp. 11,200,000.00
14	Pak. Pemasangan Pagar Dengan Mutu Layu		m	Rp. 3,210,000.00	Rp. 3,210,000.00
					Rp. 26,457,400.00
<b>JUMLAH</b>					Rp. 100,392,725.34
<b>PPN 10%</b>					Rp. 10,039,272.53
<b>JUMLAH TOTAL</b>					Rp. 110,431,997.87
<b>DIBULATKAN</b>					Rp. 110,431,997.87

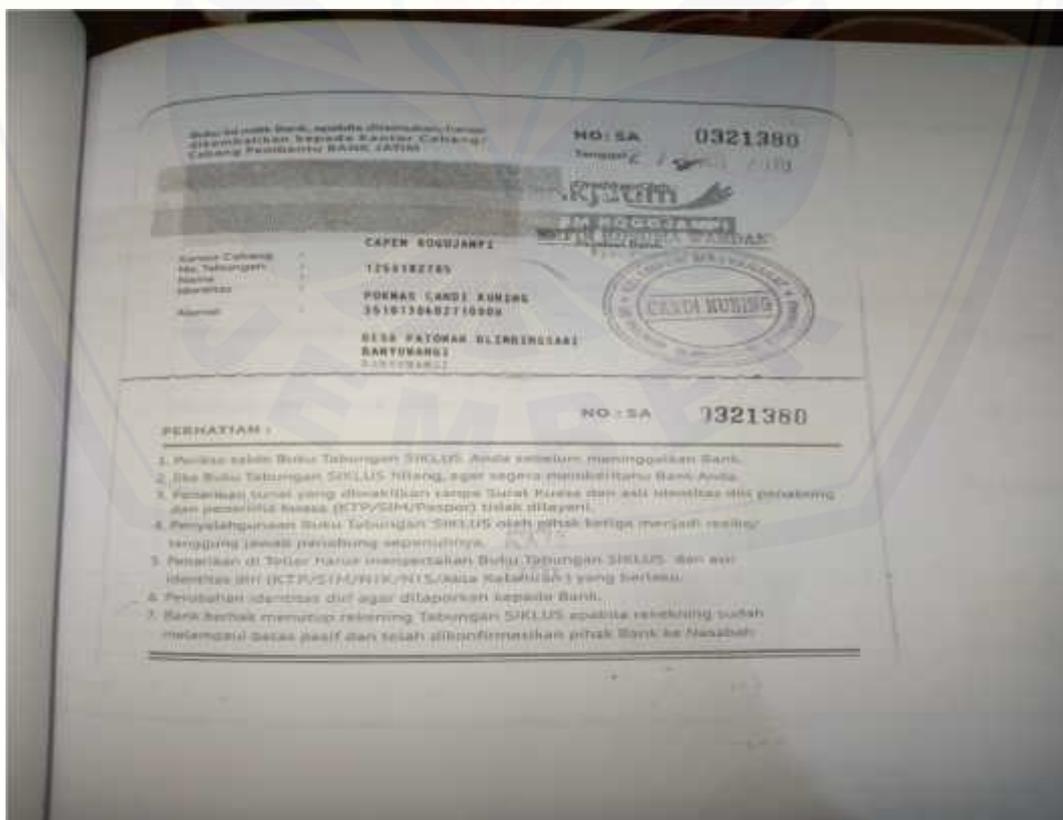
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (R. A. B)

Pembangunan Candi Bentar, Pagar dan Bale Kukul  
Desa Patoman, Kec. Bimbingsari, Kab. Banyuwangi  
2018

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
A	PEMBANGUNAN CANDI BENTAR	Rp. 38,897,000.00
B	PEMBANGUNAN PAGAR CANDI	Rp. 54,991,716.34
C	PEMBANGUNAN BALE KUL-KUL	Rp. 26,457,400.00
<b>JUMLAH</b>		Rp. 100,392,725.34
<b>PPN 10%</b>		Rp. 10,039,272.53
<b>JUMLAH TOTAL</b>		Rp. 110,431,997.87
<b>DIBULATKAN</b>		Rp. 110,431,997.87

Wibling : 0

2018  
Kantor Desa Patoman  
"CANDI KUNING"



**LAMPIRAN 5 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN NON  
PEMERINTAHAN TAHUN 2018 & 2019**

**5.1 Format Laporan Pertanggungjawaban Tempek**



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PANITIA PIODALAN DI DESA PATOMAN**

<b>• PURA PUSEH</b>	
> PENDAPATAN PURA PUSEH	RP 18.650.000
> DANA PURA	RP 2.340.000
> KERENAN	RP 888.000
	<b>RP 18.478.000</b>
PENDAPATAN KESELURUHAN PURA PUSEH	
> PENDAPATAN PURA PUSEH	RP 18.478.000
> KERENAN	RP 3.188.500
	<b>RP 5.189.500</b>
<b>• PAGERWESI</b>	
> PENDAPATAN PAGERWESI	RP 2.310.000
> PENGELUARAN PAGERWESI	RP 2.510.000
	<b>RP 2.598.000</b>
<b>• PURA DALEM</b>	
> PENDAPATAN PURA DALEM	RP 12.025.000
> DANA PURA	RP 925.000
> KERENAN	RP 492.000
	<b>RP 13.445.000</b>
PENDAPATAN KESELURUHAN PURA DALEM	
> PENDAPATAN PURA DALEM	RP 13.445.000
> KERENAN	RP 10.075.000
	<b>RP 3.367.000</b>
SISA UANG PURA DALEM	
	<b>RP 3.367.000</b>
PEMASUKAN KESELURUHAN 3 PAKET	
	<b>RP 25.125.000</b>
PENGELUARAN KESELURUHAN 3 PAKET	
	<b>RP 22.965.000</b>
JADI SISA SANGG KESELURUHAN 3 PAKET	
	<b>RP 2.160.000</b>
> FOTO COPY	RP 50.000
> JASA SETIK	RP 20.000
	<b>RP 2.160.000</b>





This image shows a printed financial statement table with multiple columns. The columns include item descriptions, units, and monetary values. The table is organized into several sections, with a total summary at the bottom. The text is somewhat small and difficult to read in detail, but the structure is clear.

This image shows a handwritten financial statement table with multiple columns. The columns include item descriptions, units, and monetary values. The handwriting is clear and legible. The table is organized into several sections, with a total summary at the bottom. The text is somewhat small and difficult to read in detail, but the structure is clear.

5.2 Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Umum

This image shows a handwritten financial statement table with multiple columns. The columns include item descriptions, units, and monetary values. The handwriting is clear and legible. The table is organized into several sections, with a total summary at the bottom. The text is somewhat small and difficult to read in detail, but the structure is clear.



**LAMPIRAN 6 DOKUMENTASI PADA SAAT OBSERVASI DAN  
WAWANCARA**



**Gambar 1.** Wawancara Bersama Pemangku Adat Dan Umat Bertempat Di Pura Puseh Pada Tanggal 14 September 2019 Pukul 19.19 WIB



**Gambar 2.** Wawancara Bersama Kelian Adat Bertempat Di Teras Rumah I Gusti Putu Sudana Pada Tanggal 15 September 2019 Pukul 10.24 WIB



**Gambar 3.** Wawancara Bersama Bendahara Banjar Bertempat Di Teras Rumah Made Mudiara Pada Tanggal 15 September 2019 Pukul 17.52 WIB



**Gambar 4.** Wawancara Bersama Umat Bertempat Di Ruang Tamu Nengah Widarti Pada Tanggal 16 September 2019 Pukul 11.07 WIB



**Gambar 5.** Wawancara Bersama Umat Bertempat Di Teras Rumah Nengah  
Diantara Pada Tanggal 16 September 2019 Pukul 11.21 WIB



**Gambar 6.** Wawancara Bersama Umat Bertempat Di Halaman Rumah Made  
Usiani Pada Tanggal 17 September 2019 Pukul 06.38 WIB



**Gambar 7.** Observasi Saat Pelaksanaan Kegiatan Pecaruan Di Piodalan Pura Puseh Pada Tanggal 20 April 2019 Pukul 11.02 WIB



**Gambar 8.** Observasi Saat Pelaksanaan Kegiatan Ngayah Di Piodalan Pura Puseh Pada Tanggal 20 April 2019 Pukul 11.04 WIB



**Gambar 9.** Observasi Saat Pelaksanaan Persembahyangan Purnama di Pura Puseh Pada Tanggal 14 September 2019 Pukul 18.48 WIB

**LAMPIRAN 7 REKAPITULASI HASIL PENELITIAN TERHADAP  
INDIKATOR PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN  
TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PURA**

Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam keseluruhan proses pengelolaan keuangan cukup sulit untuk ditelusuri. Salah satu langkah untuk memudahkan peneliti dalam mendeteksi tercapainya prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah dengan membandingkan keadaan di lapangan dengan indikator-indikator tertentu. Rekapitulasi terpenuhinya indikator dalam setiap tahap pengelolaan keuangan pura di Desa Pakraman Patoman dijabarkan dalam tabel 3.8. Bagi indikator yang telah terpenuhi akan diberikan tanda centang ( ) sedangkan bagi indikator yang tidak terpenuhi diberikan tanda silang (×).

**Tabel 7.1** Rekapitulasi Hasil Penerapan Prinsip Akuntabilitas

No	Indikator Akuntabilitas dan Transparansi	Perencanaan	Penganggaran	Pelaksanaan	Penatausahaan	Pelaporan dan pertanggung jawaban
1	Seluruh pengurus menjalankan kewajibannya sesuai <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)		×	×	×	×
2	Keterlibatan seluruh pengurus dalam pengambilan keputusan dibuktikan dengan absensi rapat		×	×	×	
3	Setiap rapat disertai dengan berita acara	×	×		×	
4	Kelengkapan administrasi dan dokumentasi	×	×			

5	Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan harus dibuktikan dengan adanya otorisasi pihak berwenang dan kelengkapan lainnya	×	×			
6	Setiap penerimaan dan pengeluaran telah dicatat dalam pembukuan yang dibuktikan dengan adanya buku kas umum dan buku bank.	×	×			×
7	Setiap kegiatan yang dilaksanakan dilengkapi dengan bukti transaksi yang mendukung seperti bukti pembayaran yang sah	×	×	×		×
8	Setiap dokumen telah diarsipkan dan disimpan rapi	×	×	×		×
9	Adanya evaluasi standar dan kinerja seluruh pengurus	×	×	×	×	
10	Hasil yang dirasakan oleh seluruh umat sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan	×	×	×	×	

**Tabel 7.2** Rekapitulasi Hasil Penerapan Prinsip Transparansi

No.	Indikator Akuntabilitas dan Transparansi	Perencanaan	Penggangan	Pelaksanaan	Penatausahaan	Pelaporan dan pertanggung jawaban
1	Keterlibatan seluruh umat dibuktikan dengan absensi	×	×		×	
2	Setiap informasi ditransfer kepada seluruh pengurus dan masyarakat	×	×		×	×
3	Seluruh pengurus mengetahui kegiatan yang diselenggarakan dibuktikan dengan pengetahuan pengurus tentang <i>time schedule</i>		×		×	×
4	Laporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan serta anggaran telah diketahui oleh seluruh pengurus dan umat yang dibuktikan dengan keseragaman persepsi dan daftar hadir			×	×	×
5	Pengurus pura telah mempublikasikan laporan pertanggungjawaban yang dibuktikan dengan print laporan pertanggung	×	×	×	×	

	jawaban dan dibagikan keseluruhan umat atau pemasangan baner di area pura					
6	Tepatnya waktu penyampaian pengumuman laporan keuangan/pertanggungjawaban yang diketahui oleh seluruh umat	x	x	x	x	

Filename: fix margin 21\_1FC16B  
Directory: C:\Users\USER\AppData\Local\Temp  
Template: C:\Users\USER\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dot  
m  
Title:  
Subject:  
Author: USER  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 04/12/2019 15:54:00  
Change Number: 2  
Last Saved On: 04/12/2019 15:54:00  
Last Saved By: USER  
Total Editing Time: 1 Minute  
Last Printed On: 04/12/2019 15:55:00  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 163  
Number of Words: 30.793 (approx.)  
Number of Characters: 199.544 (approx.)

